



PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI



PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BUKITTINGGI

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2020**

TIM PENULIS:

Pengarah : TATI YASMARNI, SE,MM
Penanggung Jawab : NIRZA SASMITA, S.Sos, MM
Pengolah dan analisa data : NINI RAHMI, SKM
Penguinput Data : MARINA DWINOVA, SKM
UTARI FERTIKA YOANDA, SE

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penulis telah dapat menyelesaikan penulisan buku “ Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2020. Shalawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender dan anak di Kota Bukittinggi Tahun 2019. Dalam buku ini disajikan profil perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bukittinggi.

Kami menyadari dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan gender banyak masalah yang belum terpecahkan akibat dari kurang tersediaan data yang relevan sampai sekarang sehingga kesetaraan dan keadilan gender belum terwujud secara optimal. Diharapkan dengan adanya buku ini OPD dan stakeholder lainnya dapat memanfaatkannya sebagai bahan pengambilan kebijakan pembangunan di bidang masing-masing.

Buku ini dapat kami susun berkat adanya jalinan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dengan beberapa pihak terkait.

Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Tim Penulis yang telah bekerjasama dalam melaksanakan penulisan buku ini

2. Bapak / Ibu Kepala OPD , Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Perempuan dan LSM di Kota Bukittinggi yang telah memberikan berbagai sumbangan pemikiran saran dan masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan buku ini.
3. Bapak/ ibu anggota kelompok kerja Data terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2020, yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbangan saran /pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal shaleh disisinya. Kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, September 2020
Kepala Dinas P3APPKB
Kota Bukittinggi



DATI YASMARNI, SE, MM
NIP. 19630629 198302 2001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	10
A. Letak Geografis	10
B. Batas Administrasi Wilayah	10
BAB III DATA GENDER DAN ANAK BIDANG KEPENDUDUKAN	14
A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	14
B. Penduduk Produktif	16
C. Penyebaran penduduk	19
D. Komposisi Penduduk Menurut Wajib KTP	21
E. Kepemilikan Kartu Keluarga	23
F. Kepemilikan Akte Kelahiran untuk Anak	24
G. Kepemilikan Kartu Identitas Anak	26
H. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan	27
I. Kepala Keluarga Perempuan	28
BAB IV DATA GENDER DAN ANAK BIDANG PENDIDIKAN	30
A. Angka Partisipasi Sekolah	31
B. Angka Partisipasi Kasar	34
C. Angka Partisipasi Murni	35
D. Melek Huruf dan Buta Huruf	37
E. Angka Putus Sekolah	37
F. Rata-rata Lama Sekolah	38
G. Sertifikasi Guru	39
H. Angka Kelulusan Paket A, B dan C	41
I. Sekolah Luar Biasa	41
J. Akses Terhadap Informasi dan Teknologi	42
BAB V DATA GENDER DAN ANAK BIDANG KESEHATAN.....	43
A. Umur Harapan Hidup	44
B. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)	45
C. Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)	53

D. Angka Kematianm Bayi (AKB)	54
E. Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif (0-6 bulan)	56
F. Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	57
G. Pelayanan Immunisasi Lengkap Pada Bayi 0-11 Bulan	59
H. Status Gizi pada Balita	61
I. Posyandu	62
J. Penderita HIV/AIDS	62
K. Keluarga Berencana	63
L. Usia Perkawinan Pertama	65
M. Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)	66
BAB VI DATA GENDER DAN ANAK BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	67
A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68
B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	69
C. Kepala Keluarga Miskin	69
D. Status Pekerjaan	70
E. Lapangan Usaha	72
F. Pekerja di Sektor Formal dan Informal	74
G. Usaha Mikro dan Kecil (UKM)	75
H. Koperasi	80
I. Kepala Keluarga Miskin	82
J. Pekerja pada Instansi Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah.....	83
BAB VII DATA GENDER BIDANG POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN	85
A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	86
B. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif .	89
1. Pegawai Negeri Sipil	89
2. Perempuan Menduduki Jabatan Eselon	90
3. Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin	91
4. Camat	92
5. Jumlah Lurah di Kota Bukittinggi	92
C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif	94
1. Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	94
2. Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	95
3. Polisi Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	96
D. Pengurus Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik	97
1. Data Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik .	97
2. Pengurus Harian Partai Politik	99
3. Kaukus Perempuan Politik	99

4. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	100
BAB VIII BIDANG HUKUM DAN SOSIAL	101
A. Bidang Hukum	101
1. Kebijakan/Program/Kegiatan yang Responsif Gender Kota Bukittinggi	102
B. Bidang Sosial Budaya	121
1. Anak Terlantar	121
2. Anak yang di Tampung di Panti Asuhan	122
3. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	122
4. Perempuan Rawan Sosial	123
5. Penduduk Lansia Menurut Pendidikan yang Ditamatkan	124
6. Penyandang Disabilitas	125
7. Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2019	126
BAB IX KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	127
A. Kekerasan Terhadap Perempuan	128
B. Kekerasan Terhadap Anak	135
BAB X PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
1. Ketersediaan Data	139
2. Kependudukan	139
3. Pendidikan	140
4. Kesehatan	141
5. Ekonomi dan Ketenagakerjaan	142
6. Politik dan Pengambil Keputusan	142
7. Hukum dan Sosial Budaya	142
8. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	143
B. Saran	143

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Bukittinggi	12
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019	15
Tabel 3.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi 2019	20
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Berdasarkan Wajib KTP Dan Kepemilikan KTP Tahun 2019.....	22
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP dan Telah Memiliki KTP Elektronik Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	23
Tabel 3.5	Jumlah Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	24
Tabel 3.6	Presentase Anak Usia 0-18 tahun yang Memiliki Akte Kelahiran menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	25
Tabel 3.7	Presentase Anak Usia 0-18 tahun yang Belum Memiliki Akte Kelahiran menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	26
Tabel 3.8	Presentase Anak Usia 0-17 tahun yang Memiliki Kartu Identitas Anak menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	27
Tabel 3.9	Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan Hasil Pendataan Keluarga di Kota Bukittinggi Tahun 2019	28
Tabel 4.1	Persentase Penduduk usia 7-24 Tahun menurut jenis kelamin, kelompok umur, Partisipasi sekolah di Kota Bukittinggi Tahun 2019	32
Tabel 4.2	Persentase Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019	39
Tabel 4.3	Jumlah guru yang telah menerima sertifikasi guru menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019	40
Tabel 4.4	Jumlah SLB Negeri dan Swasta Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	41
Tabel 4.5	Persentase anggota Rumah Tangga usia 5 tahun keatas menurut Jenis Kelamin memiliki/ menggunakan Teknologi Informasi 3 bulan terakhir Tahun 2019	42
Tabel 5.1	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2019	47

Tabel 5.2	Cakupan Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	48
Tabel 5.3	Cakupan Pelayanan Antenatal Care Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	49
Tabel 5.4	Cakupan Immunisasi Td pada Ibu Hamil menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	51
Tabel 5.5	Cakupan Immunisasi Td pada Wanita Usia Subur menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	52
Tabel 5.6	Cakupan Tablet Fe pada Bumil Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	54
Tabel 5.7	Cakupan BBLR yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	58
Tabel 5.8	Pemantauan Desa Menuju UCI di Kota Bukittinggi Tahun 2019	59
Tabel 5.9	Persentase Bayi yang mendapat Immunisasi menurut jenis Immunisasi di Kota Bukittinggi Tahun 2019	60
Tabel 5.10	Hasil pengukuran Status Gizi Balita berdasarkan Indikator BB/U berdasarkan Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	61
Tabel 5.11	Jumlah Posyandu menurut Strata Posyandu Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	62
Tabel 5.12	Cakupan Penderita HIV/AIDS berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bukittinggi Tahun 2019	63
Tabel 5.13	Jumlah PUS Peserta KB Berdasarkan Metode Kontrasepsi yang sedang digunakan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	64
Tabel 5.14	Usia Perkawinan Pertama Per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2019	65
Tabel 6.1	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019	68
Tabel 6.2	Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama di Kota Bukittinggi Tahun 2019	70
Tabel 6.3	Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut pendidikan tertinggi yang di tamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kota Bukittinggi Tahun 2019	71
Tabel 6.4	Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut umur dan Jenis kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019	72
Tabel 6.5	Persentase Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja di Informal menurut Pekerjaan utama di Kota Bukittinggi Tahun 2019	73

Tabel 6.6	Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut Jumlah Jam Kerja pada pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kota Bukittinggi tahun 2019	74
Tabel 6.7	Jumlah Penduduk Yang Berkerja menurut Status Formal dan Informal di Kota Bukittinggi Tahun 2019	75
Tabel 6.8	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang terdaftar pada Industri Kecil di Kota Bukittinggi Tahun 2019	77
Tabel 6.9	Jumlah usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2019	77
Tabel 6.10	Jumlah Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin pada UMKM per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	78
Tabel 6.11	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja menurut Jenis Industri Besar / Sedang di Kota Bukittinggi Tahun 2019	78
Tabel 6.12	Data Umum Industri di Kota Bukittinggi	79
Tabel 6.13	Partisipasi Perempuan sebagai Anggota Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	80
Tabel 6.14	Partisipasi Perempuan sebagai Pengurus Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	81
Tabel 6.15	Jenis Koperasi berdasarkan kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	81
Tabel 6.16	Persentase Kepala Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2019	82
Tabel 6.17	Tenaga Kerja di Lembaga/BUMN/BUMD/Instansi Vertikal.....	83
Tabel 6.18	Tenaga Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Tahun 2019 di Kota Bukittinggi	83
Tabel 6.19	Jumlah Tenaga Kesehatan (Medis) di Kota Bukittinggi Tahun 2019	84
Tabel 7.1	Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2019	87
Tabel 7.2	Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Komisi dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2019	88
Tabel 7.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019	89
Tabel 7.4	Jumlah PNS menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019	90
Tabel 7.5	Jumlah PNS menurut Esselon dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019	91
Tabel 7.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019	91
Tabel 7.7	Jumlah Camat di Kota Bukittinggi Tahun 2019	92
Tabel 7.8	Jumlah Lurah menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	93

Tabel 7.9	Jumlah Pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019	93
Tabel 7.10	Data Ketenagaan pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi	95
Tabel 7.11	Data Hakim menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 dan Tahun 2019	95
Tabel 7.12	Data Kepolisian menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	96
Tabel 7.13	Data Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik Tahun 2019	98
Tabel 7.14	Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019	99
Tabel 7.15	Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bukittinggi menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	100
Tabel 8.1	Jumlah Bekas Binaan Lembaga Pemasyarakatan menurut Kecamatan dan jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019	101
Tabel 8.2	Jumlah Kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2019	102
Tabel 8.3	Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang Responsif Gender di Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	102
Tabel 8.4	Peraturan dan Kebijakan Daerah yang Responsif Gender 5 Tahun Terakhir.....	113
Tabel 8.5	Peraturan dan Kebijakan Daerah yang terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	115
Tabel 8.6	Daftar Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat/LBH yang Peduli Perempuan dan Anak Tahun 2019	121
Tabel 8.7	Jumlah Anak Terlantar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019	122
Tabel 8.8	Jumlah Anak yang Ditampung di Panti Asuhan di Kota Bukittinggi Tahun 2017, 2018 dan 2019	122
Tabel 8.9	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017, 2018 dan 2019	123
Tabel 8.10	Jumlah Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Umur 60 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019	124
Tabel 8.11	Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	125
Tabel 8.12	Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2019	126
Tabel 9.1	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut umur di kota Bukittinggi Tahun 2019	128
Tabel 9.2	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut tingkat pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	129

Tabel 9.3	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Status Pekerjaan di Kota Bukittinggi	129
Tabel 9.4	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	130
Tabel 9.5	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan di Kota Bukittinggi	131
Tabel 9.6	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Tempat kejadian di kota Bukittinggi Tahun 2019	132
Tabel 9.7	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis Pelayanan di kota Bukittinggi	132
Tabel 9.8	Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Frekuensi Kekerasan di kota Bukittinggi	133
Tabel 9.9	Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Tingkat Pendidikan di kota Bukittinggi	134
Tabel 9.10	Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Status Pekerjaan di Kota Bukittinggi	134
Tabel 9.11	Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Hubungan dengan korban di kota Bukittinggi	135
Tabel 9.12	Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak menurut Jenis Kekerasan Dan jenis kelamin per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2019 /	135
Tabel 9.13	Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan, Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2019	137
Tabel 9.14	Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2019	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kota Bukittinggi	12
Gambar 3.1	Perbandingan Penduduk Produktif berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019	17
Gambar 3.2	Angka Ketergantungan Penduduk menurut Jenis Kelamin Bukittinggi 2019	18
Gambar 3.3	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi	29
Gambar 4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang Pendidikan di Bukittinggi Tahun 2019	34
Gambar 4.2	Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	36
Gambar 4.3	Persentase Penduduk 15-64 tahun menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan membaca dan menulis Kota Bukittinggi Tahun 2019	37
Gambar 4.4	Jumlah Angka Kelulusan Paket A, B dan C berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019	41
Gambar 5.1	Umur harapan Hidup Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019	44
Gambar 5.2	Jumlah Kematian Ibu di Kota Bukittinggi Tahun 2015- 2019	46
Gambar 5.3	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019	55
Gambar 5.4	Cakupan Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019	56
Gambar 5.5	Jumlah Peserta KB Baru (PB) di Kota Bukittinggi Tahun 2019	64
Gambar 8.1	Persentase Perempuan Rawan Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2019	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kesetaraan gender pada saat ini sangat berperan penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah masih diukur berdasarkan Indeks pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender Development Index (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS tahun 2018, IPM Kota Bukittinggi adalah 80,11 dan menduduki peringkat ke-1 di provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk IPG Kota Bukittinggi adalah 98,8 persen dan termasuk sepuluh tertinggi di tingkat Nasional, untuk IDG Kota Bukittinggi mencapai 62,19 persen.

Untuk IPM dan IPG meski tampak meningkat secara statistik, tidak dipungkiri masih ditemukan beberapa fakta belum dirasakan pemerataan di beberapa wilayah di daerah Kota Bukittinggi. Karena kesetaraan dan keadilan belum mencapai tahapan yang diharapkan semua pihak, oleh karena itu Pemerintah melalui beberapa kebijakan secara garis besar menyebutkan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Berdasarkan regulasi tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan data perempuan dan anak yang bersifat lokal. Dengan demikian analisis perempuan dan anak yang dilaksanakan sebagai upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengolahan

analisis serta penyajian data secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci berdasarkan jenis kelamin dan umur serta data kelembagaan serta terkait unsur-unsur pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA).

Kota Bukittinggi berkomitmen mewujudkan pembangunan berkeadilan gender dan anak berdasar kepada RPJMN 2015-2019 yang menegaskan bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia adalah berkaitan dengan upaya pembangunan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dituangkan dalam butir-butir, diantaranya;

Pertama, tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masarakat yaitu meningkatkan upaya promotif dan prefentif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu kesehatan.

Kedua; tantangan dalam pembangunan pendidikan yaitu mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat dalam memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dengan mendapatkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas, serta dapat meningkatkan akses pendidikan pada jenjang selanjutnya; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin dengan meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat.

Ketiga, meningkatkan kesetaraan gender dan perempuan dalam pembangunan; meningkatkan pemahaman, komitmen, kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah.

Tantangan selanjutnya adalah; Tantangan dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan menyeluruh mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

Meskipun berbagai upaya dan program sudah dilakukan Pemerintah Pusat dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak namun implementasi PUG tidak akan terwujud tanpa komitmen Pemerintah Daerah. Hal ini kemudian mendorong komitmen yang besar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) untuk menyusun Profil Perempuan dan Anak Tahun 2020 demi terpenuhinya data penting dalam agenda pembangunan daerah.

Dengan dukungan basis data yang memadai akan memudahkan perencanaan dan penganggaran yang mendukung lahirnya pembangunan yang berkeadilan terhadap gender, perempuan dan anak.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang mengacu tentang kesetaraan Gender,

Perempuan dan Anak diantaranya;

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
2. Pasal 28 c ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
3. UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979);

6. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik.
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan “Profil Gender dan Anak Tahun 2020” dimaksudkan untuk melihat pemerataan pembangunan terhadap perempuan dan anak di Kota Bukittinggi yang berbasis data terpilah yang menggambarkan capaian pembangunan, permasalahan pembangunan dan upaya-upaya yang telah dan masih diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu penulisan buku ini dapat memberikan gambaran secara umum berdasarkan aspek disabilitas baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, politik, ekonomi dan kekerasan terhadap

perempuan dan anak serta permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi perempuan dan anak.

Secara lebih khusus, penyusunan Profil Gender dan Anak di Kota Bukittinggi tahun 2020 memiliki tujuan;

1. Tersedianya data terpilah Perempuan dan Anak di bidang Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan, Politik dan Pengambil Keputusan, Hukum dan Sosial Budaya serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Bukittinggi.
2. Tersedianya data kebijakan, program, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan elemen masyarakat Kota Bukittinggi terkait upaya pemberdayaan perempuan di Kota Bukittinggi .
3. Tersedianya hasil analisis deskriptif tentang capaian pemberdayaan perempuan di Kota Bukittinggi . Analisis dilakukan berdasarkan ketersediaan data primer dan sekunder untuk melihat pencapaian indikator pemberdayaan Gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor Publik, bidang Pemerintahan, posisi di Parlemen, dan dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Bukittinggi .

Kegunaan Buku Profile Gender dan Anak

1. Untuk memberikan rekomendasi bagi semua pihak khususnya bagi penyusun kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang.

2. Dengan tersedianya informasi yang ada dapat mendorong capaian pembangunan berkeadilan bagi perempuan dan anak di Kota Bukittinggi .

D. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan:

Memuat latar belakang penulisan profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi , lebih spesifik diperjelas dengan landasan hukum yang mengatur tentang pentingnya program perlindungan perempuan dan anak. Maksud dan tujuan diperuntukkan untuk melihat pemerataan pembangunan yang sudah dilaksanakan terhadap perempuan dan anak. Diakhir bab ini ditutup dengan kegunaan buku Profil Gender dan Anak dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Wilayah :

Memuat tentang gambaran letak geografis , batas administrasi wilayah serta visi dan misi Kota Bukittinggi

Bab III Gender dan Anak bidang Kependudukan

Dalam bab ini memuat informasi tentang kependudukan berdasarkan jenis kelamin, penduduk produktif, penyebaran penduduk, kepemilikan KTP, akte kelahiran, Kartu Keluarga, penduduk miskin, status perkawinan dan Kepala keluarga perempuan.

Bab IV Gender Dan Anak Bidang Pendidikan

Memuat kondisi pendidikan di Kota Bukittinggi menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Kemudian diuraikan dengan angka terkait berdasarkan angka usia angka partisipasi sekolah, dan angka partisipasi murni. Angka partisipasi kasar, angka putus sekolah, rata-rata lama

sekolah, sertifikasi guru, angka kelulusan paket A ,B dan C , SLB dan penggunaan Teknologi Informasi.

Bab V Gender Dan Anak Bidang Kesehatan

Pada umum ini disampaikan data terkait angka kematian ibu dan bayi , penyebab kematian serta upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Kota bukittinggi untuk peningkatan status kesehatan di Kota bukittinggi, seperti pelaksanaan imunisasi, posyandu, peningkatan status gizi , pemberian ASI Eksklusif , Data HIV AIDS, Keluarga Berencana , usia Perkawinan Pertama serta Penggunaan narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Bab VI Gender dan Anak Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Bab ini menjelaskan tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja , Tingkat Pengangguran Terbuka, Status Pekerjaan , lapangan Usaha, pekerja sector formal dan informal, Usaha Mikro dan Kecil (UKM), Koperasi dan keterlibatan perempuan disektor ekonomi lainnya.

Bab VII Gender Dan Anak Bidang Politik Dan Pengambil Keputusan

Untuk perempuan dan pengambil keputusan, dalam bab ini memuat data yang berkaitan dengan pengambil keputusan langsung di pemerintahan dan dari sudut pandang partisipasi baik laki-laki maupun perempuan di bidang **Legislatif** yaitu; jumlah anggota partai politik menurut jenis kelamin dan jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin. Sedangkan di bidang **Eksekutif** memuat data tentang PNS menurut golongan jabatan dan jenis kelamin, dan PNS OPD menurut jenis kelamin. Dalam bidang **Yudikatif** yaitu

memuat data jumlah Hakim, Jaksa dan Polisi menurut jenis kelamin di wilayah Kota Bukittinggi.

Bab VIII. Gender dan Anak Bidang Hukum, Sosial Budaya

Dijelaskan pada Bab ini tentang Hukum, kebijakan terkait dengan Pengarusutamaan gender dan Anak serta kebijakan yang Responsive Gender, kebijakan terkait perempuan dan anak, Lembaga yang terkait peduli perempuan dan anak,serta data terkait bidang social dan budaya.

Bab IX. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Digambarkan dalam bab ini tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan jenis kelamin, pelaku kekerasan, lokasi, latar belakang pendidikan dan pekerjaan serta hal-hal lain yang terkait dengan data tersebut.

Bab X Penutup:

Memuat kesimpulan dan rekomendasi untuk pengambil keputusan menuju pemerataan keadilan bagi perempuan dan anak di Kota Bukittinggi .

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Letak Geografis

Kota Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat. Dua kata yang terhimpun jadi satu, mempunyai makna identik dengan letaknya pada ketinggian perbukitan. Kota ini memiliki luas 25,24 km² membentang antara 100°22' 03" Bujur Timur dan antara 00°17' 08" Lintang Selatan.

Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter di atas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9°C dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata.

Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

2.2 Batas Administrasi Wilayah

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang; Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Taluak IV Suku; Kecamatan Banuhampu; Kabupaten Agam.

3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto Gadang; Kecamatan IV Koto; Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

Bukittinggi merupakan pusat kebudayaan Sumatera Barat, terletak di dataran tinggi sebelah utara Padang di bukit Agam. Berbeda dengan Padang yang merupakan pusat roda pemerintahan dan perdagangan modern maka Bukittinggi adalah kota yang tenang dihiasi oleh panorama alam yang sungguh tiada duanya. Lembahnya yang sangat terkenal adalah Ngarai Sianok dengan kedalaman 100 m dan kemiringan antara 800-900 adalah salah satu daya tarik kota Bukittinggi dijadikan sebagai kota wisata.

Kota Bukittinggi memiliki nama lain yaitu Tri Arga yang artinya tiga pegunungan agung yang memberikan keberuntungan. Keagungan Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago pun ikut menghiasi moleknnya kota Jam Gadang ini. Kota Bukittinggi adalah nama sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat.

Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, di antaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangkabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Cangang, Bukit Paninjauan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat lembah yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75-110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.

Gambar 2.1. Peta Kota Bukittinggi.



Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,24 km² dengan perincian luas per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Mandiangin Koto Selayan (MKS)	12,156	48
2.	Guguk Panjang (GP)	6,831	27,06
3.	Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB)	6,252	24,77
Jumlah		25,24	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi Tahun 2020.

2.3 Visi dan Misi Kota Bukittinggi

VISI

“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya”

MISI

- 1.** Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat).
- 2.** Meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
- 3.** Meningkatkan pembangunan, penataan, dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan.
- 4.** Mengembangkan system ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
- 5.** Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan social masyarakat.

BAB III

DATA GENDER DAN ANAK BIDANG KEPENDUDUKAN

Data kependudukan salah satunya digunakan untuk melihat tren dinamika penduduk sebagai monitoring dan evaluasi program pembangunan.

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahannya sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis kelamin

Dinamika penduduk dapat dilihat dari perubahan struktur dan komposisinya menurut umur dan jenis kelamin. Proyeksi penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 130.773 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (sex ratio). Sex Ratio penduduk Kota Bukittinggi sebesar 94,45 %. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. Angka sex ratio yang lebih kecil dari 100 ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.

Distribusi penduduk Kota Bukittinggi menurut jenis kelamin tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	0 – 4	6395	6240	12635	102,48
2	5 – 9	6050	5970	12020	101,34
3	10 – 14	5348	5282	10630	101,25
4	15 – 19	6119	7508	13627	81,50
5	20 – 24	6065	8049	14114	75,35
6	25 – 29	5285	5283	10568	100,04
7	30 – 34	4980	4817	9797	103,38
8	35 – 39	4514	4479	8993	100,78
9	40 – 44	4173	4313	8486	96,75
10	45 – 49	3942	3740	7682	105,40
11	50 – 54	3147	3023	6170	104,10
12	55 – 59	2593	2722	5315	95,26
13	60 – 64	2054	2139	4193	96,03
14	65 – 69	1364	1470	2834	92,79
15	70 – 74	742	936	1678	79,27
16	75+	748	1283	2031	58,30
JUMLAH		63.519	67.254	130.773	94,45
Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio)					31,99

Sumber: BPS Kota Bukittinggi.2020

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa menurut kelompok usia terdapat beberapa kecenderungan , diantaranya penduduk perempuan lebih banyak pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun ,

40 sampai 44 tahun dan kelompok umur 55 tahun keatas. Sedangkan penduduk laki-laki, lebih banyak pada kelompok umur 0- 14 tahun , 25 samapai dengan 39 tahun dan 45 sampai dengan 54 tahun.

Dari data diatas terlihat bahwa perempuan lebih lama hidup dari pada laki -laki dilihat dari sex ratio usia 75 tahun ke atas adalah 58,3 , itu berarti usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.

Bila pembahasan difokuskan kepada perempuan terlihat bahwa perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun sebanyak 38.189 jiwa (29,2 % dari jumlah seluruh perempuan Bukittinggi). Ini berarti secara biologis adalah usia reproduksi yang akan berpotensi menjalani proses hamil dan melahirkan. Lebih dari seperempat penduduk perempuan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan kelangsungan generasi yang akan lahir, perhatian yang sangat dibutuhkan berupa kesehatan dan status gizi yang optimal serta perlunya dibekali dengan pengetahuan tentang pola asuh yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.

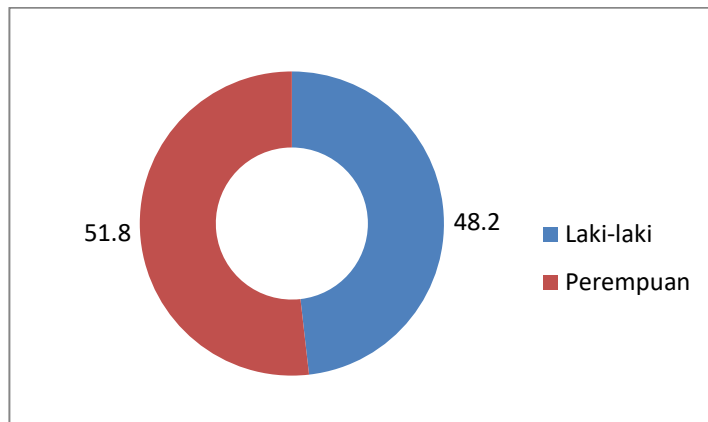
B. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15- 64 tahun), belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Penduduk belum produktif disebut juga dengan angka ketergantungan muda, sedangkan tidak produktif lagi disebut dengan angka ketergantungan tua.

Dependensi ratio Kota Bukittinggi adalah 31,99 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 32 orang penduduk usia tidak produktif. Bila dilihat berdasarkan gender,

maka penduduk perempuan yang produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif. Seperti digambarkan pada gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1. Perbandingan Penduduk Produktif berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

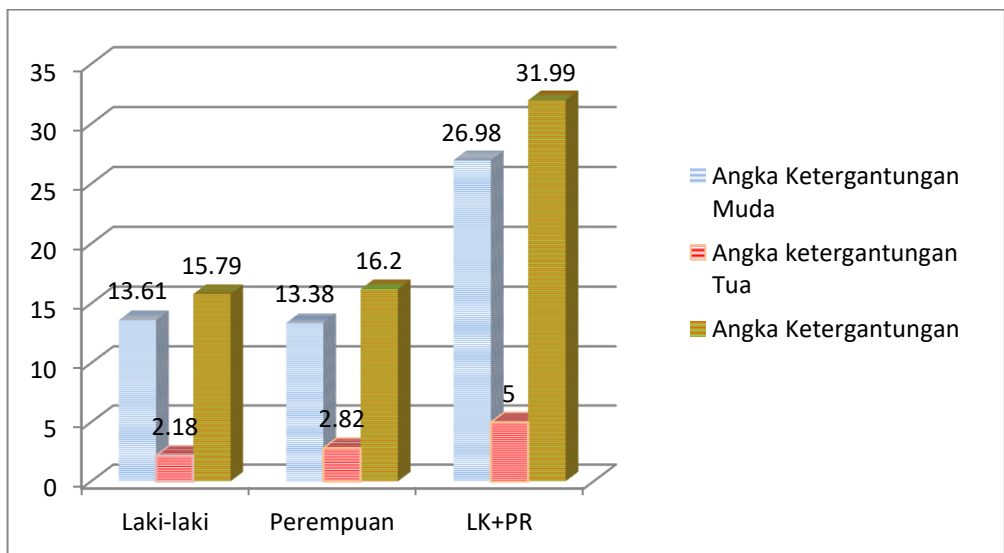


Sumber :BPS Bukittinggi 2020

Jika di at dari sisi ekonomi maka kelompok usia 15 sampai 64 tahun terdapat 46.073 jiwa (35,23%) penduduk perempuan yang masuk usia perempuan produktif. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan perempuan tersebut serta mendukung ekonomi keluarganya. Untuk itu bagi perempuan yang belum bekerja perlu mendapatkan pembinaan dan pembekalan keterampilan untuk berusaha. Angkatan kerja perempuan akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan apabila jumlah angka tersebut memenuhi persyaratan, Pertama jumlah penduduk perempuan yang terjun kepasar kerja (angkatan kerja) harus optimal. Angka ketergantungan tidak terlalu tinggi artinya jumlah penduduk tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tidak terlalu tinggi.

Angka ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin rendah angka dependency ratio maka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Rendahnya angka ketergantungan menunjukkan tingginya proporsi penduduk usia produktif relatif terhadap penduduk usia belum/tidak produktif. Sehingga secara ekonomi akan semakin besar peluang untuk menghasilkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin rendahnya dependency ratio juga menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi sehingga nilai tambah perkapita akan semakin tinggi, hal ini berarti peningkatan kesejahteraan penduduk.

Gambar 3.2 Angka Ketergantungan Penduduk menurut Jenis Kelamin Bukittinggi 2019



Sumber : BPS Bukittinggi 2020

Jika dilihat pada grafik diatas, angka ketergantungan usia muda lebih besar dari pada angka ketergantungan usia tua, hal ini

akan berdampak kepada fasilitas sosial dan ekonomi yang mesti dipersiapkan , seperti fasilitas kesehatan, pendidikan , ekonomi dan fasilitas lainnya yang mendukung terhadap pembentukan generasi muda yang berkualitas. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dari pada laki-laki, oleh sebab itu prioritas pembangunan hendaklah lebih memprioritaskan kepada perempuan.

Jumlah golongan penduduk usia tua (75+) juga cukup besar, terutama perempuan. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, terutama perempuan. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua. Bertambahnya jumlah penduduk tua dapat dimaknai sebagai meningkatnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya kondisi kesehatan tetapi juga dapat dimaknai sebagai beban karena kelompok usia tua ini sudah tidak produktif lagi.

C. Penyebaran Penduduk

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat di pelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

Tabel 3.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi , 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jml Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Guguk Panjang	6.831	48.836	35,55	6 417,22	0,65
2	Mandiangan Koto Selayan	12.156	52.464	42,55	4 315,89	1,71
3	Aur Birugo Tigo Baleh	6.252	26.996	21,90	4 317,98	2,05
Hasil Registrasi		25.239	123.296	100	4.885,14	1,4
Hasil Proyeksi			130.773	100	5 181,39	1,55

Sumber: BPS Kota Bukittinggi.2020

Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi paling banyak adalah di kecamatan Mandiangan Koto Selayan yaitu 52.464 jiwa (42,55%) dan paling sedikit di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yaitu 26.996 jiwa (21,90%).

Namun Kecamatan dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi yaitu kecamatan Guguk Panjang yaitu 6,417,22 jiwa per km², diikuti oleh kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4.317,98 jiwa per km² dan kecamatan Mandiangan Koto Selayan sebanyak 4.315,89 jiwa per km².

Ditinjau dari penyebaran penduduk berdasarkan luas daerah, kepadatan penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2019 sudah tergolong sangat padat, yaitu 5.181,39 jiwa per km². Berarti tiap km² terhuni oleh penduduk sebanyak 5.181 jiwa. Penyebaran penduduk pada tahun 2019 meningkat sekitar 81 jiwa dibandingkan dengan penyebaran penduduk pada tahun 2018 sebesar 5.100 per km².

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk menurut kabupaten dan kota menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kota Bukittinggi termasuk klasifikasi sangat padat dan merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan 18 kabupaten/kota lain di Propinsi Sumatera Barat. Kepadatan penduduk kota Bukittinggi yang demikian disebabkan salah satunya karena wilayah Kota Bukittinggi sendiri hanya mencakup 0.06% saja dari total luas Propinsi Sumatera Barat disamping berkembangnya kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan kota pendidikan di Sumatera Barat.

Dari Laju pertumbuhan penduduk tahun 2019 secara proyeksi terdapat laju sebesar 1,55%, terlihat bahwa terjadi penurunan dari tahun 2018 (1,56 %) yaitu sebesar 0,01 %.

D. Komposisi Penduduk Menurut Wajib KTP

Seluruh penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki identitas kewarganegaraan atau yang dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2019 di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa 99,83 % penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP Elektronik, Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengurusan KTP.

Tabel 3.3 JUMLAH PENDUDUK KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN WAJIB KTP DAN KEPEMILIKAN KTP TAHUN 2019

Kecamatan	Kelurahan	JUMLAH PENDUDUK			WAJIB KTP			KEPEMILIKAN KTP		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
GUGUK PANJANG	Tarok dipo	8.178	8.275	16.453	5.476	5.703	11.179	5460	5695	11155
	Bukit cangang kayu ramang	1.122	1.129	2.251	794	827	1.621	792	823	1615
	Pakan kurai	3.382	3.251	6.633	2.297	2.349	4.646	2294	2348	4642
	Aur tajungkang tengah sawah	3.678	3.638	7.316	2.571	2.607	5.178	2570	2599	5169
	Benteng P.Atas	692	735	1.427	529	562	1.091	528	562	1090
	Kayu kubu	2.081	2.091	4.172	1.453	1.511	2.964	1453	1511	2964
	Bukik apik puhun	2.821	2.763	5.584	1.963	1.965	3.928	1958	1963	3921
		21.954	21.882	43.836	15.083	15.524	30.607	15.055	15.501	30.556
MANDIANGIN KOTO SELAYAN	Campago guguk bulek	3.742	3.668	7.410	2.581	2.617	5.198	2572	2612	5184
	Campago ipuh	5.239	5.075	10.314	3.572	3.589	7.161	3566	3580	7146
	Puhun tembok	3.145	3.155	6.300	2.133	2.231	4.364	2133	2229	4362
	Kubu gulai bancah	3.027	3.033	6.060	2.102	2.127	4.229	2096	2120	4216
	Puhun pintu kabun	3.619	3.718	7.337	2.532	2.625	5.157	2527	2624	5151
	Pulai anak air	2.929	2.905	5.834	2.015	2.036	4.051	2012	2033	4045
	Koto selayan	778	777	1.555	538	524	1.062	538	524	1062
	Garegeh	1.405	1.378	2.783	980	974	1.954	979	973	1952
	Manggis ganting	2.456	2.415	4.871	1.655	1.636	3.291	1651	1634	3285
		26.340	26.124	52.464	18.108	18.359	36.467	18.074	18.329	36.403
AUR BIRUGO TIGO BALEH	Aur kuning	3.493	3.540	7.033	2.316	2.454	4.770	2315	2450	4765
	Birugo	2.967	2.965	5.932	2.017	2.138	4.155	2014	2136	4150
	Belakang balok	1.317	1.319	2.636	912	955	1.867	911	955	1866
	Sapiran	1.536	1.440	2.976	986	999	1.985	986	997	1983
	Kubu tanjung	812	811	1.623	530	552	1.082	529	550	1079
	Pakan labuh	1.552	1.613	3.165	1.073	1.090	2.163	1072	1089	2161
	Parit antang	785	759	1.544	535	535	1.070	531	534	1065
	Ladang cakiah	1.046	1.041	2.087	686	744	1.430	683	743	1426
		13.508	13.488	26.996	9.055	9.467	18.522	9.041	9.454	18.495
		61.802	61.494	123.296	42.246	43.350	85.596	42.170	43.284	85.454

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bukittinggi Tahun 2020

Tabel. 3. 4 Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP dan Telah Memiliki KTP Elektronik Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Kecamatan	Penduduk	Wajib KTP	Memiliki KTP Elektronik	%
1	G. Panjang	43.836	30.607	30.556	99,83
2	MKS	52.464	36.467	36.403	99,82
3	ABTB	26.996	18.522	18.495	99,85
JUMLAH		123.296	85.596	85.454	99,83

Sumber: Dinas Disdukcapil Kota Bukittinggi Tahun 2020

Bila dilihat perkembangan kepemilikan KTP Elektronik dari tahun 2019 telah mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yaitu dari 97,1 % meningkat menjadi 99,8 % ditahun 2019.

E. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. dan diterbitkan oleh Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada tahun 2019 di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa 88,86% (127.517) keluarga telah memiliki KK dan 11,14 % yang belum memiliki KK (15.984), selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Jumlah Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019

NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN			JUMLAH KEPALA KELUARGA		
	LK	PR	JML	LK	PR	JML
G. Panjang	21.954	21.882	43.836	10.235	2.390	12.625
MKS	26.340	26.124	52.464	12.221	2.451	14.672
ABTB	13.508	13.488	26.996	6.266	1.249	7.515
JUMLAH	61.802	61.494	123.296	28.722	6.090	34.812

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bukittinggi Tahun 2020

F. Kepemilikan Akte Kelahiran untuk Anak

Hak Sipil anak adalah hak asasi yang melekat pada pribadi seseorang (anak) sebagai seorang individu unik ditengah masyarakat sehingga ia bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara leluasa termasuk hak identitas anak. Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 5, yaitu “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” dan pasal 27 ayat 1 yaitu “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya,” ayat 2 identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akte

kelahiran. Lebih lanjut Akte Kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap warga negaranya.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Salah satu hak sipil anak adalah mendapatkan aktekelahiran seperti yang tercantum dalam pasal 5 bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dari penduduk usia 0-18 tahun, yang telah memiliki akte kelahiran di Kota Bukittinggi sekitar 93,82%, yang terdiri dari 45,3% anak perempuan dan 48,5% anak laki- laki-, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6. Presentase Anak Usia 0-18 tahun yang Memiliki Akte Kelahiran menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No.	Kec.	JML PENDUDUK 0-18 TH			AKTE KELAHIRAN			%
		Laki-laki	Perempuan	Jml	Laki-laki	Perempuan	Jml	
1	GP	7.400	6.859	14.259	6.932	6.441	13.373	93,79
2	MKS	8.911	8.394	17.305	8.332	7.911	16.243	93,86
3	ABTB	4.805	4.326	9.131	4.486	4.080	8.566	93,81
Jumlah		21.116	19.579	40.695	19.750	18.432	38.182	93,82

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bukittinggi Tahun 2020

Sedangkan penduduk yang belum memiliki Akte Kelahiran masih terdapat sebanyak 6,18 % atau 2.513 orang anak 0 sampai 18 tahun, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Presentase Anak Usia 0-18 tahun yang Belum Memiliki Akte Kelahiran menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No.	Kec.	JML PENDUDUK 0-18 TH			BELUM MEMILIKI AKTE KELAHIRAN			%
		Laki-laki	Perempuan	Jml	Laki-laki	Perempuan	Jml	
1	GP	7.400	6.859	14.259	468	418	886	6,21
2	MKS	8.911	8.394	17.305	579	483	1.062	6,13
3	ABTB	4.805	4.326	9.131	319	246	565	6,19
Jumlah		21.116	19.579	40.695	1.366	1.147	2.513	6,18

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bukittinggi Tahun 2020

G. Pemilikan Kartu Identitas Anak

Mulai tahun 2016, seluruh anak wajib memiliki KTP dalam bentuk Kartu Identitas Anak (KIA). Segala ketentuan dan kebijakan mengenai KIA ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Secara umum, KIA memiliki kegunaan yang sama dengan KTP. penerbitan KIA dapat melindungi pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum, hingga untuk mencegah terjadinya perdagangan anak.

Dikota Bukittinggi, Kartu identitas anak baru dimiliki oleh 35,83% laki-laki dan 39,02% anak perempuan dari jumlah anak 0-17 tahun, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 Presentase Anak Usia 0-17 tahun yang Belum Memiliki Kartu Identitas Anak menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Kelurahan	WAJIB KIA (0-17 th)			KEPEMILIKAN KIA			%	
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR
1.	G.P	6.871	6.358	13.229	2.453	2.445	4.898	35,7	38,46
2.	MKS	8.232	7.765	15.997	3.014	3.191	6.205	36,61	41,09
3.	ABTB	4.453	4.021	8.474	1.540	1.444	2.984	34,58	35,91
	JUMLAH	19.556	18.144	37.700	7.007	7.080	14.087	35,83	39,02

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bukittinggi Tahun 2020

H. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tidak langsung status perkawinan akan mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 3.9. Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan
Hasil Pendataan Keluarga di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Kec	Jml KK	Belum kawin		Kawin		Janda/ Duda	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Guguk Panjang	8.872	114	1,28	6.826	76,94	1.932	21,78
2	Mandiangan K. Selayan	11.376	170	1,49	9.093	79,93	2.113	18,57
3	Aur Birugo Tigo Baleh	5.744	49	0,85	4.729	82,33	966	16,82
	Bukittinggi	25.992	333	1,28	20.648	79,44	5.011	19,28

Sumber : Pendataan Keluarga/PBDKI Dinas P3APPKB Tahun 2020

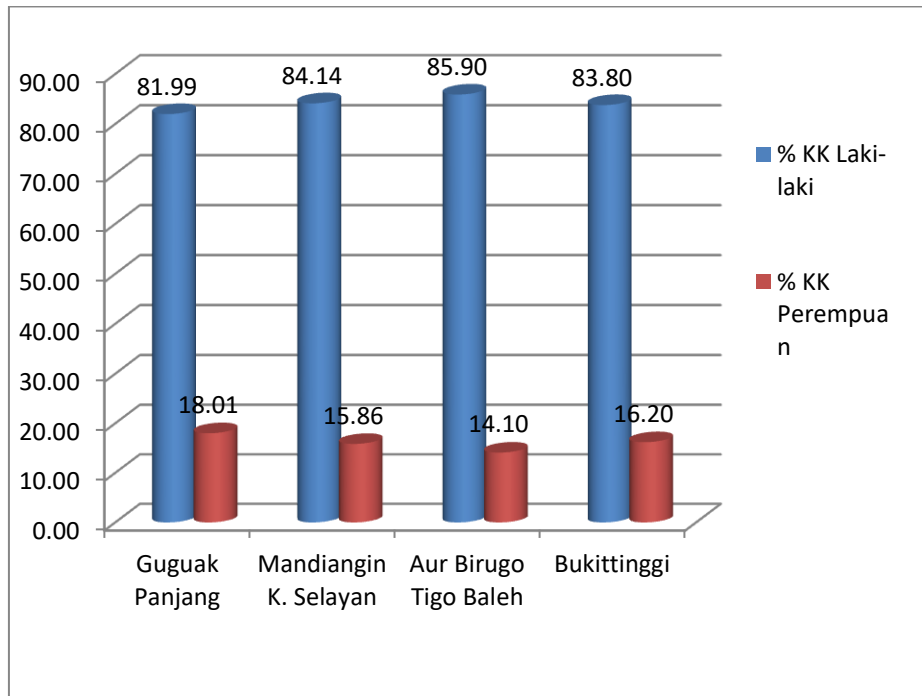
Tabel diatas menggambarkan bahwa 79,44 % dari kepala keluarga yang berstatus kawin, selain dari itu berstatus belum kawin dan janda /duda.

I. Kepala Keluarga Perempuan

Kepala Keluarga tidak hanya berjenis kelamin laki-laki saja tetapi perempuan pun ada yang berperan sebagai kepala keluarga. Peran kepala keluarga sangatlah besar dalam mengambil keputusan dalam sebuah keluarga, seperti memilihkan pendidikan untuk anak-anak, menjaga kesehatan keluarga, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan suatu daerah.

Di bawah ini memperlihatkan persentase Kepala rumah tangga menurut jenis kelamin tahun 2019.

Gambar 3.3 Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi



Sumber: Pendataan Keluarga/PBDKI

Tabel di atas menggambarkan bahwa terdapat 4212 orang atau 16,20% kepala keluarga di Kota Bukittinggi adalah perempuan, hal ini berarti perempuan haruslah memiliki kemampuan baik secara ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya.

BAB IV

DATA GENDER DAN ANAK BIDANG PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian juga peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususna bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan ,rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas yang baik tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan

penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya gunakan. Tanpa mengenyampingkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada bab ini. Data dan informasi yang dihasilkan diharapkan akan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Gambaran mengenai pendidikan pada bab ini antara lain mencakup Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan, angka buta huruf, angka putus sekolah dan akses internet.

A. Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah, antara lain ditunjukkan oleh persentase penduduk yang tidak pernah sekolah terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Partisipasi sekolah yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun non formal, apakah

tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah lagi. Seseorang dengan status masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada dibawah pengawasan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kementerian Agama (Kemenag) dan Instansi lain yang terkait.

Persentase penduduk yang masih sekolah dapat digunakan untuk mengukur tingkat perluasan kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk usia 7-24 Tahun menurut jenis kelamin , kelompok umur, Partisipasi sekolah di Bukittinggi Tahun 2019

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Tidak /Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-laki			
7-12	1,15	98,85	
13-15		100	
16-18		81,22	18,78
19-24		36,94	63,06
7 - 24	0,4	75,4	24,2
Perempuan			
7-12		100	
13-15		97,29	2,71
16-18		91,13	8,87
19-24		40,02	59,98
7 - 24		73,99	26,01

Jumlah Total			
7-12	0,62	99,38	0
13-15	0	98,54	1,46
16-18	0	86,64	13,36
19-24	0	38,71	61,29
7 - 24	0,19	74,65	25,16

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2020

Tabel 4.1 memberikan gambaran tentang partisipasi sekolah penduduk usia 7 -24 tahun .Sebagian besar penduduk 7-24 tahun masih bersekolah, yaitu 74,65%. Sedangkan 0,19 % tidak/ belum pernah sekolah dan 25,16 % sudah tidak sekolah lagi. Bila dilihat dari kelompok umur, terlihat bahwa pada usia 7 tahun sampai 18 tahun (jenjang SD sampai dengan SMA) partisipasi sekolah masih cukup tinggi, tetapi pada usia 19 sampai dengan 24 tahun (jenjang perkuliahan) terlihat masih rendahnya partisipasi sekolah .

Pada tabel juga terlihat bahwa partisipasi sekolah anak usia 7 – 24 tahun menurut jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki akses pendidikan lebih baik dari pada perempuan, hal ini dapat dilihat dari persentase anak laki-laki yang masih bersekolah sebesar 75,4 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan , yaitu 73,99 persen. Sebaliknya anak laki-laki yang tidak bersekolah lagi sebesar 24,2 persen dan tidak/ belum bersekolah 0,4 persen lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan. Persentase anak perempuan yang tidak sekolah lagi adalah 26,01 persen.

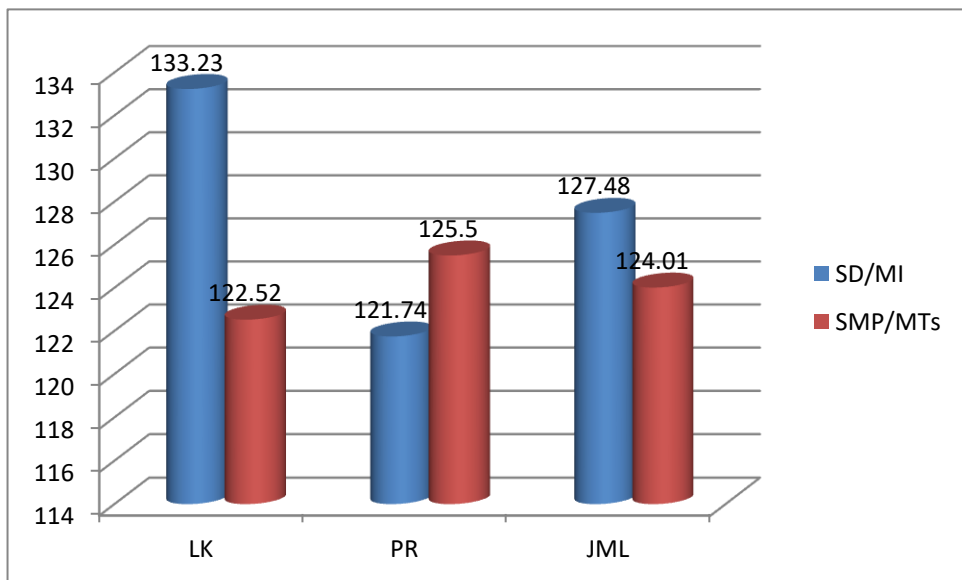
Tetapi bila dilihat berdasarkan usia dan jenis kelamin, ternyata akses terhadap pendidikan jenjang SD sampai SMA lebih tinggi pada perempuan dari pada laki-laki. Terlihat bahwa pada laki-laki usia 16 sampai 18 tahun terdapat 18,78 persen yang tidak sekolah lagi , sedangkan anak perempuan 16-18 tahun sebesar 13,36 persen yang tidak sekolah lagi.

B. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut,

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Gambar 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang Pendidikan di Bukittinggi Tahun 2019



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2020

Dari gambar di atas terlihat bahwa APK siswa SD /MI sudah melebihi nilai 100%, yaitu 105,78 %. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibandingkan usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah diusia yang lebih muda. Faktor lain yang menyebabkan APK melebihi 100% adalah adanya siswa yang berasal dari luar Kota Bukittinggi yang bersekolah di Bukittinggi.

Salah satu penyebab tingginya APK tingkat jenjang pendidikan SLTP di Kota Bukittinggi adalah karena peminatan dan daya tampung pendidikan jenjang SLTP di Kota Bukittinggi lebih besar, sebab Bukitinggi merupakan kota pendidikan yang memiliki fasilitas pendidikan dan mutu yang cukup baik di Sumatera Barat.

C. Angka Partisipasi Murni

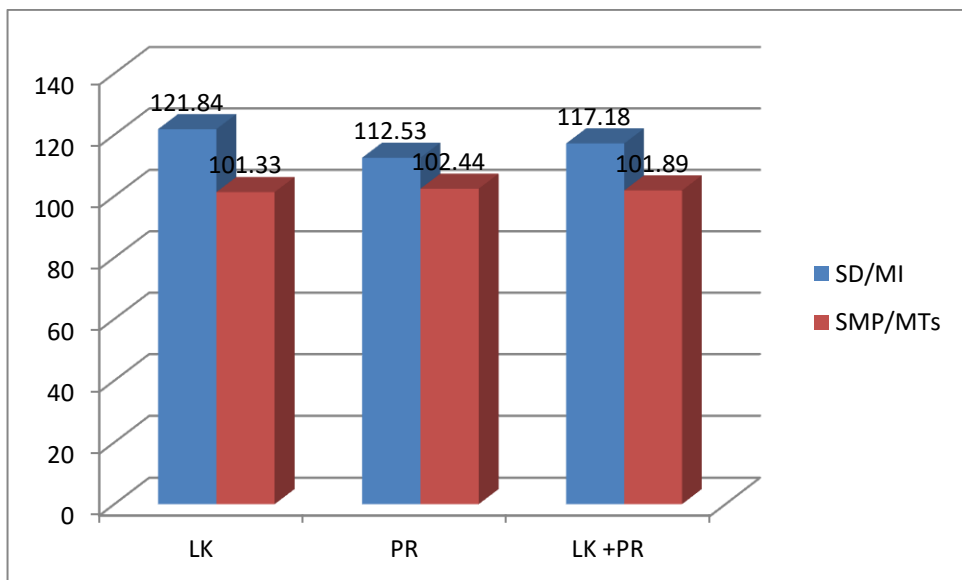
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu (7 sampai dengan 18 tahun) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka

Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Gambar berikut menunjukkan Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2019

Gambar 4.2. Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.



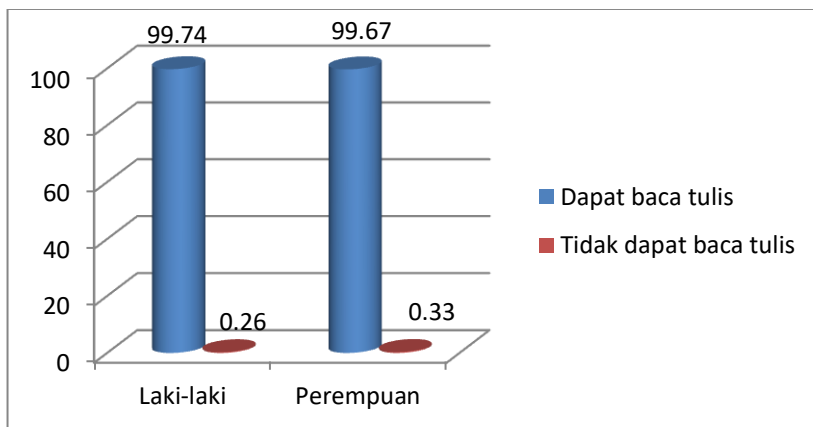
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2020

D. Melek Huruf dan Buta Huruf

Melek Huruf didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik mutu sumber daya manusia dalam masyarakat. Kemampuan membaca dan menulis (baca tulis) merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk menuju hidup sejahtera.

Persentase penduduk Kota Bukittinggi berumur 19 tahun ke atas yang melek huruf menurut jenis kelamin tahun 2019 adalah sebesar 99,74 %, dan 99,67 % perempuan. Hal ini menunjukkan pencapaian pendidikan dasar yang efektif dan berhasilnya program keaksaraan, seperti terlihat pada grafik 4.3 dibawah ini :

Grafik 4.3 Presentase Penduduk 15-64 tahun menurut Jenis Kelamin dan Kepandaian membaca dan menulis Kota Bukittinggi Tahun 2019



Sumber : BPS tahun 2020

E. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah di Bukittinggi pada tahun 2018 adalah sebanyak 11,3 %, Berdasarkan data dari UNICEF, faktor ekonomi

adalah alasan utama siswa putus sekolah. Anak-anak dari 20 persen keluarga termiskin hampir lima kali lebih mungkin untuk tidak masuk SD dan SMP, dibandingkan 20 persen dari keluarga terkaya. UNICEF mengungkapkan bahwa status ekonomi keluarga, memiliki dampak yang paling signifikan pada kehadiran anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama. Oleh sebab itu penurunan angka kemiskinan harus menjadi prioritas dalam pembangunan khususnya di Bukittinggi.

F. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk Propinsi Sumatera Barat adalah 8,92 tahun, sedangkan untuk Kota Bukittinggi, rata-rata lama sekolah 11,31 (tahun 2018). Ini berarti penduduk Bukittinggi sudah menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tertinggi yang dimiliki seseorang merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formalnya. Semakin tinggi ijazah yang dimiliki rata-rata penduduk suatu negara semakin tinggi taraf intelektualitas negara tersebut.

Keberhasilan program pembangunan pendidikan dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan sebagian besar penduduk. Berdasarkan data susenas pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun ke atas adalah SLTA ke bawah dengan presentase mencapai 78,45 %.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki di Kota Bukitinggi Tahun 2019

Tabel 4. 2 Persentase Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019

No.	Pendidikan Tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	Tidak Punya Ijazah	7,13	11,5	9,41
2	SD Sederajat	13,93	11,91	12,88
3	SLTP sederajat	21,82	18,09	19,87
4	SLTA sederajat	40,28	32,62	36,29
5	Diploma I/II	0,42	1,17	0,81
6	D III	4,64	7,63	6,20
7	D IV / S1	11,20	15,79	13,59
6	Diploma S2/S3	0,58	1,29	0,95
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas BPS Kota Bukittinggi.

Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan terlihat bahwa pendidikan laki-laki relatif lebih baik dibandingkan dengan pendidikan perempuan pada jenjang pendidikan SLTA ke bawah, Sedangkan untuk pendidikan DIII/Akademi dan S1/Diploma IV lebih banyak pada perempuan.

G. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru ini dilakukan dengan tujuan untuk pemetaan kompetensi, sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mana sebagai bagian dari proses penilaian

kinerja agar mendapatkan gambaran yang utuh terhadap pelaksanaan semua standar kompetensi.

Tabel 4.3 Jumlah guru yang telah menerima sertifikasi guru menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

NO.	KECAMATAN	GURU SD			GURU SLTP			TOTAL
		L	P	L + P	L	P	L + P	
1	MKS	31	146	177	5	36	41	218
2	GP	46	211	257	28	157	185	442
3	ABTB	27	134	161	2	23	25	186
	JUMLAH	104	491	595	35	216	251	846

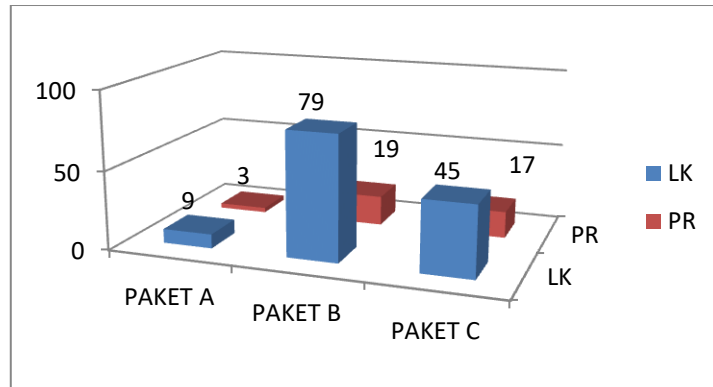
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi Tahun 2019

Gambar di atas memperlihatkan bahwa guru sertifikasi banyak diterima oleh guru SD, apabila dibandingkan dengan data guru yang ada di Kota Bukittinggi, maka penerima sertifikasi lebih banyak perempuan karena jumlah guru perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Pendapatan perempuan dari sertifikasi menyebabkan kaum perempuan yang berprofesi guru memiliki kemampuan finansial lebih dari pada suami, hal ini bila diamati berpengaruh terhadap kehidupan sosial guru bahkan kepada keutuhan rumah tangganya. Hal ini akan dibahas pada kasus perceraian pada bab tertentu.

H. Angka Kelulusan Paket A, B dan C

Gambar 4.4. Jumlah Angka Kelulusan Paket A, B dan C berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2018.



Sumber: Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Grafik 4.6. di atas menggambarkan bahwa laki-laki lebih banyak yang lulus pada Paket A dan Paket B Paket dari pada perempuan.

I. Sekolah Luar Biasa (SLB)

Tabel 4.4. Jumlah SLB Negeri dan Swasta Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Kec.	SLB Negeri					SLB Swasta				
		T K	SD	SLT P	SLT A	Jm 1	T K	SD	SLT P	SLT A	Jm 1
1	MKS	0	1	0	0	1	0	3	1	0	4
2	G.P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ABTB	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Jumlah						1					6

Sumber: Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2019.

J. Akses terhadap Informasi dan Teknologi

Tabel 4.5 Persentase anggota Rumah Tangga usia 5 tahun keatas menurut Jenis Kelamin memiliki/ menggunakan Teknologi Informasi 3 bulan terakhir Tahun 2018

Jenis Kelamin	Memiliki telpon seluler (HP) / Nirkabel	Memiliki telpon seluler (HP) / Nirkabel atau komputer (PC/Desktop/Laptop, Note book,tablet)	Mengakses Internet
Laki-laki	80,02	87,49	60,16
Perempuan	79,54	88,59	58,6
Rata-rata	79,78	88,04	59,38

Dari tabel 4.5 diatas terlihat bahwa penggunaan telpon seluler (HP)/ Nirkabel atau komputer (PC/Desktop/ Laptop, Notebook, tablet) sudah mencapai 88,04 %, yang berarti sistem komunikasi dan informasi serta teknologi sudah semakin mudah dan semakin cepat terakses oleh masyarakat. Akses terhadap internet juga sudah dipergunakan oleh 59,38% masyarakat, hal ini berdampak positif dan negatif bagi masyarakat, terutama pada generasi muda . Dampak positif yang terjadi adalah semakin mudahnya masyarakat untuk menambah pengetahuan, mudahnya komunikasi, mempermudah dunia bisnis sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Dampak negatif penggunaan internet ini adalah semakin mudahnya anak dibawah umur mengakses tontonan yang berbau pornografi serta games on line yang menyebabkan anak menjadi kecanduan terhadap tontonan ini.

BAB V

GENDER DAN ANAK BIDANG KESEHATAN

Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan dan anak melalui pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjangkau setiap lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tingginya disparitas dan perlunya percepatan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat dalam pengelolaan pembangunan kesehatan menjadi penting.

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional, maka pembangunan di Kota Bukittinggi khususnya pembangunan kesehatan telah diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Terkait dengan itu, pelayanan kesehatan perempuan dan anak-anak dapat dilihat dari beberapa layanan yang diberikan, diantaranya layanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan, layanan kesehatan terhadap pengidap HIV/AIDS, pelayanan keluarga berencana dan sebagainya.

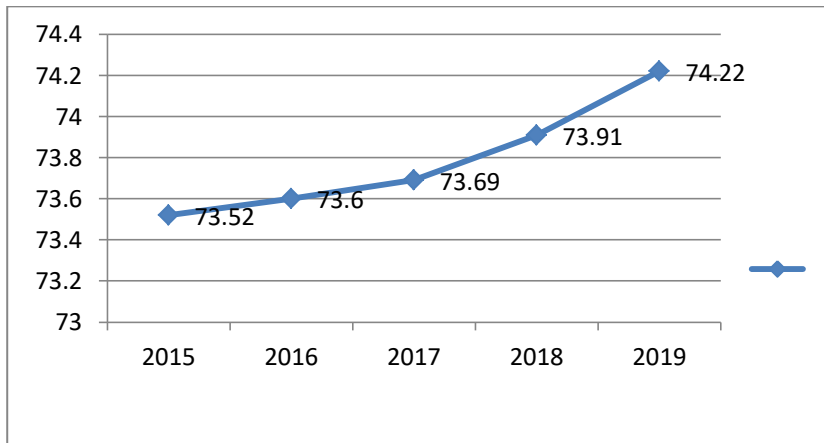
A. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup warga Bukittinggi selalu mengalami peningkatan hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Penghitungan angka harapan hidup dengan menghitung rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki sistem pendataan kematian berdasarkan kelompok umur. "Jadi angka harapan hidup berhubungan erat dengan angka kematian bayi. Jika angka kematian bayi tinggi, maka angka harapan hidupnya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, angka kematian bayi rendah, angka harapan hidup tinggi.

Gambar dibawah ini menunjukkan peningkatan Umur harapan Hidup penduduk Kota Bukittinggi dari tahun 2015 samapai dengan tahun 2019.

Gambar 5.1 Umur harapan Hidup Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2020

Gambar diatas memperlihatkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

B. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

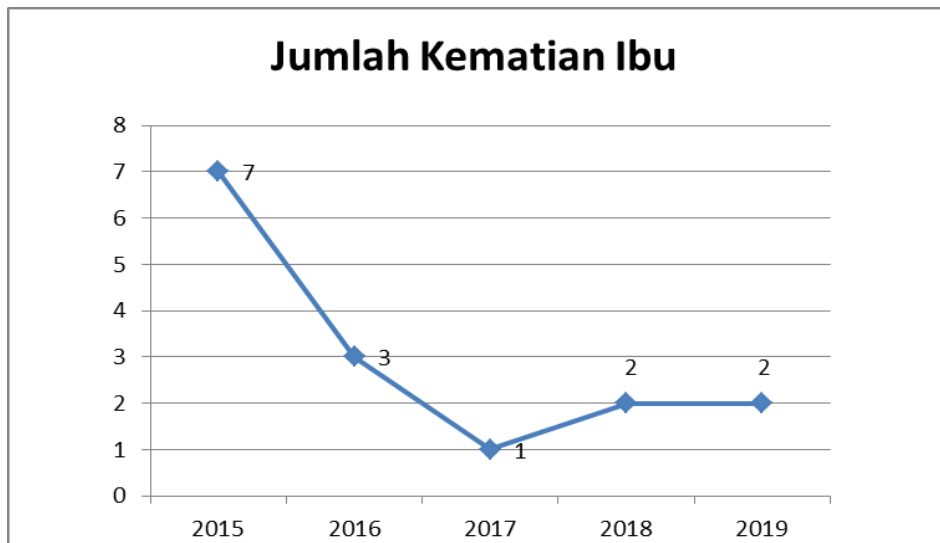
Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang dikarenakan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Angka kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh

- a. Keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan.
- b. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran.
- c. Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.

Pada Gambar 5.2 berikut terlihat kecendrungan jumlah kematian ibu maternal sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kota Bukittinggi.

Gambar 5.2. Jumlah Kematian Ibu di Kota Bukittinggi Tahun 2015- 2019



Sumber: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Jumlah kematian ibu melahirkan di Kota Bukittinggi tahun 2019 adalah 2 jiwa. Kasus ini yaitu 1 orang kematian ibu melahirkan yang terjadi di wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan 1 orang kematian ibu nifas di Kecamatan Guguk panjang.

1. Penyebab Kematian Ibu

Dari 2 kasus kematian Ibu pada tahun 2019, penyebabnya adalah gangguan metabolik saat nifas dan Hipertensi dalam kehamilan , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2019

No	Kecamatan	Pendarahan	Hipertensi dlm kehamilan	Infeksi	Ggn Sistem Peredaran Darah	Ggn. Metabolik	Lain - Lain
1	G.Panjang	0	0	0	0	1	0
2	MKS	0	1	0	0	0	0
3	ABTB	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	1	0	0	1	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020

2. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) dengan Kompetensi Kebidanan

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu di Indonesia. Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan, hal ini disebabkan antara lain pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional).

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan yang bertujuan untuk mengamankan proses persalinan .

Tabel 5.2. Cakupan Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Kecamatan	Linakes		
		Sasaran	Absolut	%
1	Guguk Panjang	722	669	92,66
2	Mandiingin Koto Selayan	1089	1043	95,77
3	ABTB	498	451	90,56
Jumlah		2309	2163	93,67

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2020.

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Antenatal Care)

Ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam siklus pertumbuhan dan perkembangan anak, begitu juga dengan ibu hamil. Gangguan kesehatan yang dialami ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin dalam kandungan, bahkan gangguan tersebut jika tidak cepat ditanggulangi, akan berlanjut sampai setelah ia lahir, masa balita dan remaja. Pelayanan antenatal (ANC) pada ibu hamil adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan (Nakes) profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif.

Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan ante natal (K1 dan K4) di Kota Bukittinggi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3. Cakupan Pelayanan Antenatal Care Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Kecamatan	Sasaran	K1		K4	
			Jml	%	Jml	%
1	GP	756	737	97,49	703	92,99
2	MKS	1141	1110	97,28	1093	95,79
3	ABTB	522	488	93,49	470	90,04
Jumlah		2.419	2335	96,53	2266	93,68

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Dari tabel di atas terlihat bahwa 96,53 % ibu hamil di wilayah Kota Bukittinggi sudah mendapatkan pelayanan Antenatal Care pertama kali, sedangkan persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan sebanyak 93,68 %.

Untuk pelaksanaan ANC terpadu pada Ibu Hamil, Dinas kesehatan melalui UPTD Puskesmas melaksanakan kegiatan yang berintegrasi dengan program lain, antar lain :

- Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke anak (PPIA)
- Pencegahan malaria dalam Kehamilan (PMDK)

- TB dalam Kehamilan
- Kecacingan dalam Kehamilan
- Pencegahan IMS dalam Kehamilan
- Pencegahan Hepatitis B dalam Kehamilan
- Pemeriksaan Hb,KEK,Protein Urin, Gula Darah
- Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil.

4. Immunisasi Tetanus Toxoid dan Difteri (Td) pada Ibu Hamil

Vaksin DTP jenis Tdap, direkomendasikan untuk diberikan pada ibu hamil di usia kehamilan 27-36 minggu atau segera setelah bayi lahir. Vaksin ini dapat diberikan, tanpa mempertimbangkan kapan terakhir kali ibu hamil mendapatkan vaksin Tdap atau Td (tetanus-diphtheria). Immunisasi Vaksin Td yang disuntikkan berisi *booster* (penguat) berupa anti-tokso. Ini berfungsi menguatkan kekebalan tubuh.

Untuk wanita hamil boleh divaksin Td. Syaratnya, wanita hamil baru boleh divaksin [difteri](#) pada trimester ke-2 atau trimester ke-3. Karena kalau masih trimester pertama itu usia kehamilannya masih rentan dan bahaya buat pembentukan janin di awal kandungan . Kekebalan tubuh pun baru terbentuk biasanya dua minggu kemudian setelah divaksin.

Tabel 5.4 Cakupan Immunisasi Td pada Ibu Hamil menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Kec	Jml Bumil	Immunisasi Td Pada Ibu Hamil											
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5		Td2+	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	Guguk Panjang	756	120	15,9	121	16,0	129	17,1	123	16,3	120	15,9	493	65,2
2	Aur Birugo Tigo Baleh	522	86	16,5	166	31,8	174	33,3	87	16,7	27	5,2	454	87,0
3	Mandiingin Koto Selayan	1.141	154	13,5	230	20,2	211	18,5	172	15,1	157	13,8	770	67,5
	Kota Bukittinggi	2.419	360	14,9	517	21,4	514	21,2	382	15,8	304	12,6	1.717	71,0

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020

Tabel 5.5 Cakupan Immunisasi Td pada Wanita Usia Subur menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Kec	Jml WUS Tdk Hamil (15-35 TH)	Immunisasi Td Pada WUS Tidak Hamil									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	Guguk Panjang	6.540	94	1,4	91	1,4	81	1,2	70	1,1	80	1,2
2	Aur Birugo Tigo Baleh	4.515	12	0,3	18	0,4	29	0,6	15	0,3	10	0,2
3	Mandiingin Koto Selayan	9.863	252	2,6	72	0,7	53	0,5	52	0,5	96	1,0
	Kota Bukittinggi	20.918	358	1,7	181	0,9	163	0,8	137	0,7	186	0,9

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020

5. Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)

Zat besi merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Unsur Fe merupakan unsur paling penting untuk pembentukan sel darah merah. *Zat besi* secara alamiah didapatkan dari makanan. Jika manusia kekurangan zat besi pada menu makanan yang dikonsumsinya sehari-hari, dapat menyebabkan gangguan anemia gizi (kurang darah). Tablet zat besi (Fe) sangat dibutuhkan oleh wanita hamil, sehingga ibu hamil diharuskan untuk mengonsumsi tablet Fe minimal sebanyak 60 tablet selama kehamilannya.

Manfaat Zat Besi (Fe)

Zat besi (Fe) berperan sebagai sebuah komponen yang membentuk *mioglobin*, yakni protein yang mendistribusikan oksigen menuju otot, membentuk enzim, dan kolagen. Selain itu, zat besi juga berperan bagi ketahanan tubuh.

Tablet zat besi (Fe) penting untuk ibu hamil karena memiliki beberapa fungsi berikut ini:

- Menambah asupan nutrisi pada janin
- Mencegah anemia defisiensi zat besi
- Mencegah pendarahan saat masa persalinan
- Menurunkan risiko kematian pada ibu karena pendarahan pada saat persalinan

Cakupan pemberian tablet zat besi di Kota Bukittinggi Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel .5.6. Cakupan Tablet Fe pada Bumil Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL	FE1 (30 TABLET)		FE3 (90 TABLET)	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Mandiingin Koto Selayan	1141	1110	97,3	1093	95,8
2	Guguk Panjang	756	737	97,5	703	93
3	Aur Birugo Tigo Baleh	522	488	93,5	470	90,0
KotaBukittinggi		2419	2.335	96,5	2.266	93,7

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020

C. Angka Kematian Bayi (AKB)

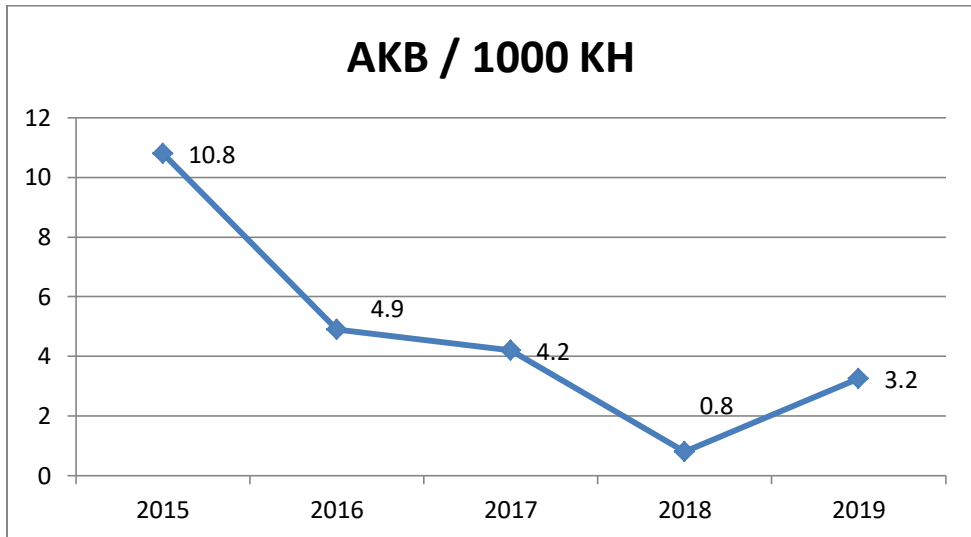
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan salah satu indikator sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Jumlah Kematian Bayi di Kota Bukittinggi tahun 2019 adalah sebanyak 7 kasus, atau Angka Kematian Bayi sebesar 3,2 /1.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami peningkatan (kematian bayi mengalami peningkatan) dibandingkan tahun 2018 (0,8 /1000) . Grafik perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota

Bukittinggi dalam 5 tahun terakhir dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 5.3. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019.



Sumber : Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Grafik diatas memperlihatkan terjadinya peningkatan kasus kematian bayi pada tahun 2019, yaitu 3 kasus meninggal (Kecamatan Guguk Panjang dan Kec. Mandiingin Koto Selayan) pada neonatal dan 4 kasus pada post natal (kec. Mandiingin Koto Selayan dan kec Aur Birugo Tigo Baleh).

Bayi usia kurang dari satu bulan mempunyai tubuh yang sangat lemah dan rentan terkena penyakit. Itulah kenapa bayi yang baru lahir perlu mendapatkan perhatian khusus supaya kesehatannya tetap optimal. Sebab jika tidak, hal ini bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian.

Beberapa penyebab kematian diatas antara lain adalah Hypotermi, aspirasi pneumonia, kelainan kongenital, respiratory arest/ cardiac arest.

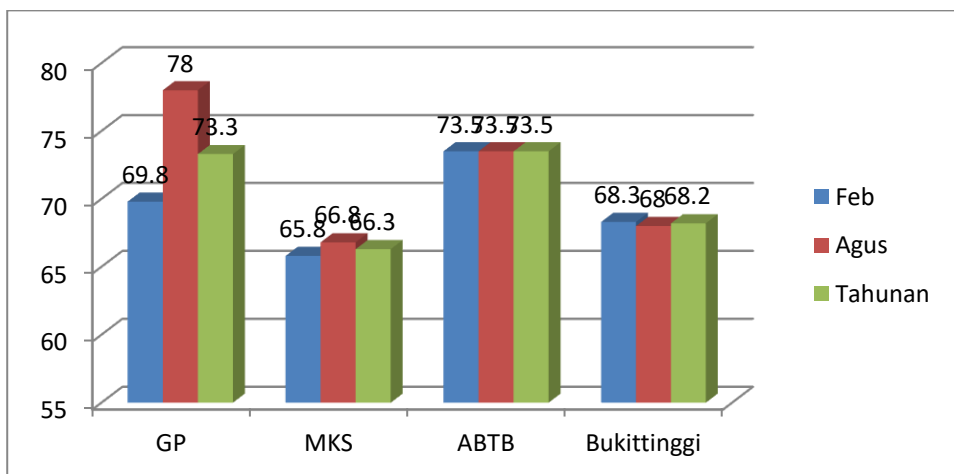
1. Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif (0-6 bulan)

Cara Pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya.

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta melindungi terhadap penyakit.

Tabel berikut ini menyajikan persentase kecendrungan cakupan anak usia 0 – 6 bulan yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif tahun 2018 di Kota Bukittinggi.

Gambar.5.4. Cakupan Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019



Sumber : Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa pemberian ASI Eksklusif kepada bayi 0-6 bulan masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor ;

- Gencarnya promosi susu formula untuk bayi 0-6 bulan yang tidak ada masalah medis
- Masih adanya tenaga kesehatan yang tidak berpihak terhadap hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan mendorong untuk menggunakan susu formula pada bayi 0-6 bulan.
- Pemasaran susu formula masih banyak yang ditujukan pada bayi yang tidak punya masalah kesehatan.
- Masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI
- Belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI,
- Belum semua rumah sakit melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM)

Apabila dilihat dari jenis kelamin terlihat bahwa hamper sama cakupan bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif antara laki-lak dan perempuan.

Tenaga Konselor Menyusui dan Konselor PMBA

Untuk kelancaran proses menyusui, di 7 Puskesmas yang ada di Bukittinggi telah terdapat 12 orang tenaga konselor menyusui dari Tenaga Puskesmas , sedangkan untuk Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) telah tersedia tenaga konselor dari Petugas Puskesmas sebanyak 24 orang dan 461 orang dari kader yang telah dilatih.

2. Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah didefinisikan sebagai bayi lahir yang berat badannya kurang dari 2500 gram. Bayi yang mempunyai berat badan lahir rendah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan anak, cenderung mempunyai pertumbuhan fisik yang terhambat. Selain itu mudah terkena infeksi. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah 1,1%, dimana ditemukan 26 bayi dengan berat badan lahir <2500 gram dari 2.460 bayi yang lahir. Adapun cakupan BBLR pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7. Cakupan BBLR yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Kecamatan	Bayi BBLR								
		Laki-laki			Perempuan			L+P		
		Jml lahir hidup	BBLR	%	Jml lahir hidup	BBLR	%	Jml lahir hidup	BBLR	%
1	GP	451	4	0,9	448	1	0,2	899	5	0,6
2	MKS	542	10	1,8	502	7	1,4	1044	17	1,6
3	ABTB	256	1	0,4	261	3	1,1	517	4	0,8
Jumlah		1249	15	1,2	1211	11	0,9	2460	26	1,1

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua bayi BBLR perempuan dan laki-laki sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

3. Pelayanan Immunisasi Lengkap Pada Bayi 0-11 Bulan

Program immunisasi di Kota Bukittinggi merupakan bentuk pencegahan penyakit dan perlindungan terhadap penyakit dengan memberikan vaksin pada sasaran immunisasi. Program imunisasi ini dilakukan oleh petugas puskesmas, tidak hanya menunggu di puskesmas akan tetapi mencari dan melaksanakan immunisasi di luar puskesmas seperti posyandu dan pos-pos pelayanan kelurahan lainnya, serta dengan pengembangan program pada bidan-bidan praktek swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh terhadap masyarakat.

Immunisasi Dasar Lengkap adalah bayi yang telah mendapatkan semua immunisasi mulai dari BCG dan Polio1, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 1 dan Polio 2, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 2 dan Polio 3, DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 3 dan Polio 4 serta mendapatkan campak.

Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan

Tabel 5.8 Pemantauan Desa Menuju UCI di Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	DESA / KELURAHAN	Sasaran tahunan SI	Jumlah Imunisasi Lengkap	% Pencapaian	DESA UCI ATAU NON UCI
1	G.PANJANG	392.119	455	116.04	uci
2	R.AHMAD	321.09	254	79.11	non uci
3	TIGO BALEH	495.257	415	83.79	uci
4	MANDIANGIN	367.794	325	88.36	uci
5	NILAM SARI	302.603	280	92.53	uci
6	GULAI BANCAH	121.625	108	88.80	uci
7	PLUS. MKS	289.954	158	54.49	non uci
7	PUSKESMAS	2290	1995	87.10	71.43

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2020

Tabel 5.9 Persentase Bayi yang mendapat Imunisasi menurut jenis Imunisasi di Kota Bukittinggi Tahun 2019

Jenis Imunisasi	Persentase
BCG	74,47
Campak/ Measles	56,30
DPT 1	70,81
DPT 2	66,54
DPT 3	59,24
Polio 1	76,13
Polio 2	70,73
Polio 3	65,48
Polio 4	53,14
Hepatitis B1	67,96
Hepatitis B2	60,16
Hepatitis B3	56,54

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2020

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin , maka pencapaian imunisasi pada Bayi laki-laki terlihat capaian lebih banyak dari pada perempuan pada imunisasi DPT/ HB 3 serta Polio 4, sebagai mana tabel dibawah ini :

NO	PUSKESMAS	Survival Infant			DPT / HB 3			Polio 4		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JML
1	GUGUK PANJANG	138.17	253.95	392.12	170.09	99.62	124.45	177.32	97.26	125
2	RASIMAH AHMAD	159.57	161.52	321.09	80.21	77.39	78.79	79.59	78.01	79
3	TIGO BALEH	247.14	248.12	495.26	84.16	79.00	81.57	86.59	80.61	84
4	MANDIANGIN	186.82	180.98	367.79	95.82	91.72	93.80	96.35	92.83	95
5	NILAM SARI	155.68	146.92	302.60	96.35	85.76	91.21	93.14	107.54	100
6	GULAI BANCAH	57.41	64.22	121.63	94.07	85.65	89.62	97.55	90.32	94
7	PLUS MANDIANGIN	144.00	145.95	289.95	59.72	64.41	62.08	68.05	69.89	69
	PUSKESMAS	1088.79	1201.66	2290.44	95.52	84.47	89.72	97.82	88.13	93

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020

D. Status Gizi pada Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan di Kota Bukittinggi ditemukan 67 orang (1,26%) Balita yang berstatus gizi buruk dan 349 orang (6,58%) berstatus gizi kurang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.10 Hasil pengukuran Status Gizi Balita berdasarkan Indikator BB/U berdasarkan Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

	Kecamatan	Status Gizi (Indikator BB/U)			
		Buruk	Kurang	Baik	Lebih
1	G.Panjang	0,75	6,2	90,94	2,12
2	MKS	1,06	5,71	90,67	2,56
3	ABTB	2,38	8,77	86,39	2,46
	Kota Bukittinggi	1,26	6,57	89,78	2,39

Sumber Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Dari tabel diatas diketahui bahwa Balita yang berstatus gizi buruk masih ditemukan sebanyak 1,26 % dan 6,57% berstatus gizi kurang menurut indikator BB/U.

Menurut UNICEF ada 3 faktor penyebab terjadinya gizi buruk pada anak, yaitu penyebab langsung, penyebab tak langsung dan penyebab yang mendasar. Penyebab langsung adalah asupan gizi yang kurang serta penyakit infeksi. Kekurangan asupan gizi disebabkan oleh terbatasnya asupan makan yang dikonsumsi atau makanan yang tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan. Sedangkan infeksi menyebabkan rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak mampu menyerap zat makanan secara baik. Penyebab tidak langsung

E. Posyandu

Tabel 5.11. Jumlah Posyandu menurut Strata Posyandu Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Kecamatan	Strata Posyandu				Jml	Posyandu Aktif	% Posyandu Aktif
		Pra tama	Ma dya	Pur Nama	Man diri			
1	MKS	0	5	32	11	48	43	89,6
2	GP	1	21	24	11	57	35	61,4
3	ABTB	0	9	5	17	31	22	70,9
Jumlah		1	35	61	39	136	100	73,5

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah posyandu yang ada di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 135 posyandu dan yang aktif adalah 122 posyandu (90,4%).

F. Penderita HIV /AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif.

Pemetaan epidemi HIV di Indonesia dibagi menjadi lima kategori, yaitu <90 kasus, 90-206 kasus, 207-323 kasus, 324-440 kasus, dan > 440 kasus. Di Kota Bukittinggi pada tahun 2019 kasus HIV sebanyak 62 kasus yang terdiri atas 47 orang laki-laki dan 15 orang perempuan..

Menurut jenis kelamin, proporsi kasus baru HIV / AIDS di Kota Bukittinggi tahun 2018 pada kelompok laki-laki lebih besar dibandingkan persentase pada kelompok perempuan. . Tabel dibawah ini merupakan kasus HIV AIDS tahun 2019.

Tabel 5.12. Cakupan Penderita HIV/AIDS berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Umur	HIV/ AIDS		
		Lk	Pr	Jml
1	≤ 4 th	0	0	0
2	5 – 14 th	1	0	1
3	15 – 19 th	0	0	0
4	20 – 29 th	7	1	8
5	30 – 39 th	35	13	48
6	40 – 49 th	0	0	0
6	50 – 59 th	3	1	4
7	>60 th	0	0	0
	Total	47	15	62

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2020.

G. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang dicanangkan sejak tahun 1990 an. Program Keluarga Berencana lebih menekankan kualitas keluarga dari pada kuantitasnya.

Alat yang paling banyak digunakan perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun di Kota Bukittinggi adalah suntik , IUD dan Implan , sedangkan yang paling sedikit adalah MOW (Medis Operasi Wanita). Akseptor KB laki-laki masih sangat rendah yaitu 56 orang MOP dan 844 orang Kondom.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

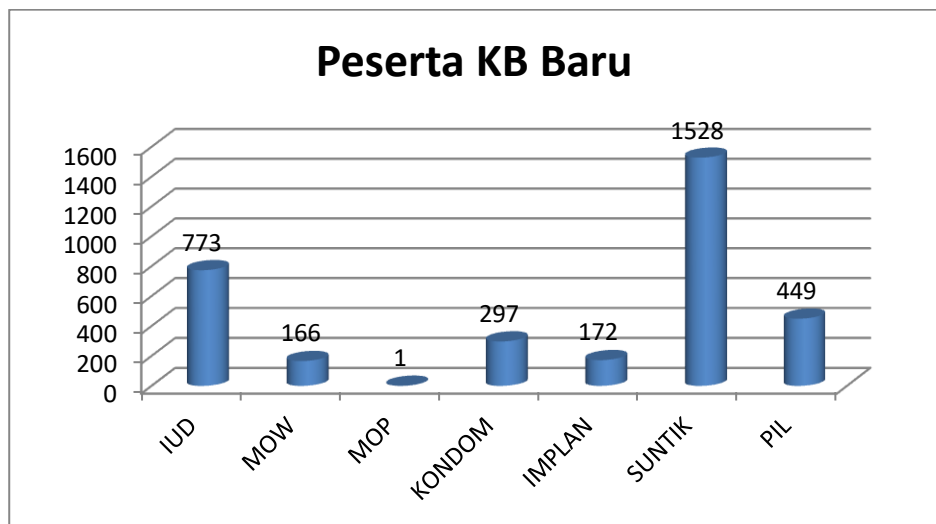
Tabel 5.13. Jumlah PUS Peserta KB Berdasarkan Metode Kontrasepsi yang sedang digunakan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Kec.	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Pria			Total
		IUD	MOW	IMPLAN	Suntik	Pil	Jml	MOP	Kondom	Jml	
1	GP	1157	212	486	1370	404	3629	23	272	295	3.924
2	MKS	1812	149	437	1.752	484	4634	20	304	324	4.958
3	ABTB	582	139	165	1013	266	2165	13	268	281	2.446
Jumlah		3.551	500	1088	4135	1154	10428	56	844	900	11328

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi .

Jumlah Peserta KB Baru (PB) Kota Bukittinggi tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 5.1 Jumlah Peserta KB Baru (PB) di Kota Bukittinggi Tahun 2019.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi .

Untuk peserta KB Baru tahun 2019 , terbanyak adalah pemakaian alat kontrasepsi suntik.

H. Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan Pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama atau semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis, disamping itu bagi usia perkawinan pertama yang masih tergolong muda akan mengakibatkan anak tidak memperoleh hak atas pendidikan, hak bermain, kehilangan masa remaja dan kehilangan masa-masa dimana mereka seharusnya bias mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam hidup.

Usia Perkawinan Pertama Hasil pendataan Keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.14. Usia Perkawinan Pertama Per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2019.

Usia Perkawinan Pertama PUS Per Kecamatan hasil pendataan Keluarga di Kota Bukittinggi tahun 2019.

No	Kecamatan	PUS	ISTRI				SUAMI			
			<21 TAHUN		≥ 21 TAHUN		<25 TAHUN		≥ 25 TAHUN	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	G. Panjang	4.804	1065	22,2	3739	77,8	1126	23,4	3678	76,6
2	MKS	6.474	1319	20,4	5155	79,6	1385	21,4	5089	78,6
3	ABTB	3.444	543	15,8	2901	84,2	656	19,0	2788	81,0
Jumlah		14.722	2927	19,9	11795	80,1	3167	21,5	11555	78,5

Sumber: DP3APPKB Kota Bukittinggi tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 19,9 % perempuan yang menikah diusia muda kurang dari 21 tahun dan 21,5 % laki-laki menikah diusia kurang dari 25 tahun. Terlihat bahwa perkawinan pertama di Kota Bukittinggi sebagian besar adalah pada usia lebih dari 21 tahun pada perempuan dan lebih dan sama 25 tahun.pada laki-laki.

I. Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut data yang dilaporkan oleh Polres Bukittinggi, dilaporkan jumlah kriminal Narkotika diterima 70 kasus, dan diputuskan sebanyak 60 kasus.

BAB VI

GENDER DAN ANAK BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenaga kerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diperoleh berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun.

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, baik yang bekerja atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia 15 tahun ke atas. Akan

tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja, bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

Pada tahun 2018 jumlah laki-laki usia 15 tahun keatas adalah 44.981 jiwa, sedangkan perempuan 49.069 jiwa.

Tabel 6.1. Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Kegiatan Utama	Lak-laki	Perempuan	LK +PR
I	Angkatan Kerja	35.009	27.274	62.283
	1. Bekerja	32.618	25.838	58.456
	2. Pengangguran	2.391	1.436	3.827
II	Bukan Angkatan Kerja	10.854	22.647	33.501
	1. Sekolah	6.242	8.194	14.436
	2. Mengurus rumah tangga	2.295	13.417	15.712
	3. Lainnya	2.317	1.036	3.353
III.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)(%)	76,33	54,63	65,02
IV	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,83	5,27	6,14

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2020, Hasil Sarkernas

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2019 sebesar 65,02 %. Hal ini berarti sebanyak 65 dari 100 orang penduduk usia kerja termasuk dalam angkatan kerja. Terbagi menjadi 2 golongan yaitu penduduk yang bekerja sebanyak 58.456 orang dan pengangguran 3.827 orang.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin terlihat tingkat partisipasi angkatan kerja laki- laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu laki-laki 76,33% berbanding 54,63% perempuan.

Sebaliknya perempuan yang bukan angkatan kerja lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu perempuan 22.647 orang berbanding dengan laki-laki sebanyak 10.854 orang

Banyaknya perempuan yang tidak termasuk angkatan kerja disebabkan perempuan yang berstatus ibu rumah tangga yaitu sebanyak 13.417 orang dan sekolah 8.194 orang ..

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dan yang tidak mencari pekerjaan atau tidak mempersiapkan usaha karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja biasanya tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kemiskinan dan kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase antara pengangguran laki-laki dan perempuan. Pengangguran pada laki-laki sebanyak 2.391 orang (6,83%) dan pada perempuan sebanyak 1.436 orang (5,27%).

C. KEPALA KELUARGA MISKIN

Penduduk miskin adalah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2019 terdapat 6000 jiwa atau 4,6 %, angka ini sedikit menurun dibanding tahun 2018 yaitu 6315 jiwa atau

4,92 % penduduk bukittinggi yang berada dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan

D. STATUS PEKERJAAN

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/ kegiatan. Indikator status pekerjaan terdiri dari enam kategori yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, berusaha dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dan pekerja keluarga/pekerja tak dibayar.

Tabel 6.2. Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama di Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Status Pekerjaan Utama	Lk	Pr	Lk + Pr
1	Berusaha sendiri.	8.638	5.245	13.883
2	Berusaha dibantu buruh tdk tetap/ buruh tak dibayar.	3.968	2.701	6.669
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar.	2.878	943	3.821
4	Buruh/karyawan/ pegawai.	14.112	12.024	26.136
5	Pekerja bebas	1.238	559	1.797
6	Pekerja keluarga/ tak dibayar	1.784	4.366	6.150
	Total	32.618	25.838	58.456

Sumber: Sakernas BPS Kota Bukittinggi 2019 .

Pada tahun 2019, mayoritas penduduk di Kota Bukittinggi bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai buruh / karyawan / pegawai.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk bekerja di Kota Bukittinggi Tahun 2019, mayoritas adalah SMA, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.3 : Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut pendidikan tertinggi yang di tamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Kegiatan Utama	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	
Tidak / Belum pernah sekolah	0	0	0	121
Tidak/ belum tamat SD	4.008	179	4187	1828
Sekolah Dasar	5.941	113	6.054	4174
SMP	9735	562	10297	11.121
SMA	15.161	766	15.927	9.225
SMA Kejuruan	10.234	1.059	11.293	3156
Diploma I/II/III/ Akademi	3651	84	3735	1990
Universitas	9726	1064	10790	1886
Jumlah	58456	3827	62.283	33.501

Sumber : BPS / Sakernas 2019

Tabel diatas juga menggambarkan bahwa angka pengangguran terbuka banyak terdapat pada penduduk yang berpendidikan SMA kejuruan dan tamatan universitas.

Hal ini disebabkan karena sempitnya lahan pekerjaan dan masih rendahnya minat untuk membuka usaha sendiri, atau berwirausaha pada sebagian besar masyarakat.

Dari penduduk yang bekerja bila dilihat dari usia , angka tertinggi adalah pada usia 35 – 44 tahun. Baik pada laki-laki ataupun perempuan. Seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.4 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut umur dan Jenis kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
15 – 24	4771	4184	8955
25 – 30	5.373	4.299	9.672
31 – 34	2997	2536	5533
35 – 44	7977	6185	14162
45 – 54	6811	4864	11675
55 – 59	2084	1714	3798
60 – 64	1331	1333	2664
65 +	1274	723	1997
Jumlah	32618	25838	58456

Sumber : BPS, Hasil Sakernas 2019

Tabel diatas menggambarkan bahwa usia tertinggi yang bekerja adalah usia 35 – 44 tahun dan usia 45 sd 54 tahun, sedangkan perempuan banyak di usia 35 – 44 tahun.

E. Lapangan Usaha

Bekerja merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Lapangan usaha yang terbesar di Kota Bukittinggi adalah pada perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel.

Tabel 6.5. Persentase Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja di Informal menurut Pekerjaan utama di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Lk	Pr	Lk + Pr
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.	1763	761	2524
2	Industri/ pengolahan.	3049	4235	7284
3	Listrik, Gas dan air	468	303	771
4	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.	13952	11981	25933
5	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	4629	341	4970
6	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, Tanah dan jasa perusahaan	1004	569	1573
4	Jasa Kemasyarakatan, social dan perorangan.	5154	7648	12802
5	Lainnya	32618	25838	58456

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Hasil Sakernas 2019.

Dari tabel di atas terlihat bahwa lapangan pekerjaan yang terbanyak baik laki-laki maupun perempuan banyak pada lapangan pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel dan jasa. Hal ini disebabkan karena Bukittinggi merupakan kota pariwisata dan kota perdagangan/ jasa, sehingga terbuka lahan pekerjaan bagi masyarakat.

Jika dibandingkan antara pekerja laki-laki dan perempuan , maka lapangan kerja di industri pengolahan dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan lebih banyak di lakukan oleh pekerja perempuan.

Tabel 6.6 Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut Jumlah Jam Kerja pada pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kota Bukittinggi tahun 2019

Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama (Jam)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0	446	1026	1472
1-14	1361	2801	4162
15-24	1344	2874	4218
25-34	3144	2183	5327
35-40	5708	4929	10637
41+	20615	12025	32640
Jumlah	32618	25838	58456

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Hasil Sakernas 2019.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa perempuan yang bekerja 0 sampai 24 jam per minggu pada pekerjaan utama lebih banyak dari pada laki-laki, hal ini tentunya disebabkan karena perempuan juga harus menyediakan waktunya untuk pekerjaan lain selain dari pekerjaan utama, seperti di rumah tangga.

F. Pekerja di Sektor Formal dan Informal

Pengelompokan tenaga kerja dapat dibedakan menurut kegiatan formal dan kegiatan informal. Pendekatan kelompok formal dan informal yang digunakan didasarkan kepada kombinasi antara status pekerjaan (employment status) dan jenis pekerjaan (occupation). Seorang pekerja dikategorikan pekerja formal didefinisikan sebagai pekerja yang berstatus “berusaha dibantu pekerja tetap/pekerja dibayar,” “buruh/karyawan,” di luar itu sebagai pekerja informal.

Tabel 6.7. Jumlah Penduduk Yang Berkerja menurut Status Formal dan Informal di Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Status	Laki-laki		Perempuan		Laki2 + Perempuan	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Formal	16990	52,09	12.967	50,19	29.957	51,25
2	Informal	15628	47,91	12.871	49,81	28.499	48,75
Total		32618	100	25.838	100	58.456	100

Sumber: Sakernas - BPS Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Kesulitan ekonomi dan tuntutan biaya kehidupan yang semakin tinggi, telah mendorong sebagian besar wanita untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya. Bagi wanita yang telah berkeluarga umumnya mereka bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi biaya kehidupan sehari-hari. Dorongan dan keinginan wanita untuk bekerja tersebut sering kali tidak didukung oleh ketersediaan lapangan kerja, oleh karena itu mereka cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja disektor informal. Sektor informal merupakan bagian angkatan kerja di kota yang berada diluar pasar kerja yang terorganisir, yakni tidak tersentuh kebijakan pemerintah serta dapat meliputi kegiatan usaha yang sifatnya marginal dengan waktu kerja yang tidak teratur (Stephani, 2008).

Dari hasil survey angkatan kerja Nasional tahun 2019, penduduk perempuan bekerja hampir sama di sektor formal dan di sektor in formal, namun di sektor informal lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

G. Usaha Mikro dan Kecil (UKM)

Bukittinggi sebagai Kota wisata sangat besar pengaruhnya kepada roda perekonomian di Kota Bukittinggi, sehingga bermunculan usaha-usaha perekonomian masyarakat berupa Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang terdiri dari sentra-sentra industri.

UMKM atau “ Usaha Mikro Kecil Menengah”selama ini mempunyai peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja dan merupakan jantung perekonomian di Indonesia khususnya Kota Bukittinggi. Adapun perbedaan dari usaha mikro, kecil dan menengah menurut UUD No.20 tahun 2008 yang digolongkan jumlah asset dan pendapatan pertahun adalah sebagai berikut:

1. Usaha Kecil merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah, dan hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai 2,5 M.
2. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki asset yang lebih besar dari 500 juta dan omset lebih besar dari 2,5 M – 50 M pertahun.
3. Usaha mikro memiliki aset senilai 50 juta dan jumlah omset lebih besar dari 300 juta.

Selain itu penggolongan jenis usaha berdasarkan pusat statistic melihat berdasarkan dari jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan dalam usaha tersebut.

Karakteristik yang dimiliki oleh jenis usaha mikro, adalah tidak tetapnya atau seringnya berganti komoditi usaha, serta tempat atau lokasi usaha yang masih berpindah-pindah atau belum menetap pada suatu tempat tertentu. Dan biasanya belum ada administrasi keuangan yang khusus atau keuangan dari usaha digabungkan dengan keuangan keluarga. Contoh usaha yang masih tergolong dalam jenis usaha mikro adalah: peternakan, nelayan dan pembudidaya, salon kecantikan atau tukang jahit.

Masalah utama yang menjadi kendala adalah akses pasar dan pemanfaatan teknologi yang masih rendah karena sebagian besar masih menggunakan cara tradisional, dan kurangnya modal usaha yang mereka miliki karena takut meminjam pada Bank.

Tabel 6.8. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang terdaftar pada Industri Kecil di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Jenis Industri	Jumlah	Jumlah Tenaga kerja
1	Makanan dan minuman	781	2006
2	Sandang dan Kulit	982	4625
3	Logam, Barang Kimia dan Kerajinan Lainnya	123	333
4	Industri kecil lainnya	332	1125
	Jumlah	2218	8089

Sumber : Dinas Penanaman Modal , PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja Th 2019

Tabel 6.8. di atas menggambarkan bahwa Industri kecil yang paling banyak terdapat di Kota Bukittinggi adalah Industri kecil Sandang dan Kulit.

Jumlah usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.9 Jumlah usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2019

No	Kecamatan	Kecil	Menengah	Mikro	Jumlah
1.	Aur Birugo Tigo Baleh	162	8	1688	1858
2.	Guguk Panjang	315	19	2934	3268
3.	Mandiangan Koto Selayan	175	4	1710	1889
	Jumlah	652	31	6332	7015

Sumber : Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Th 2020

Adapun Jumlah tenaga kerja pada UMKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.10 Jumlah Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin pada
UMKM per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Kecamatan	Kecil			Menengah			Mikro		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Aur Birugo Tigo Baleh	271	219	490	13	4	17	1362	1523	2885
2.	Guguk Panjang	404	297	701	38	17	55	1196	1330	2526
3.	Mandiingin Koto Selayan	253	241	494	6	42	48	908	971	1879
	Jumlah	928	757	1685	57	63	120	3466	3824	7290

Sumber : Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Th 2020

Dari table diatas terlihat bahwa untuk usaha kecil banyak dikelola oleh laki-laki, sedangkan untuk menengah dan mikro banyak dikelola oleh perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan di Kota Bukittinggi memiliki akses yang baik untuk peningkatan ekonomi keluarga.

Tabel 6.11. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja menurut Jenis
Industri Besar / Sedang di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga kerja
1	Industri Makanan ,minuman dan Tembakau	1	60
2	Industri Barang Kimia Potrolen, Bata,Karet dan Barang dari plastik	2	49
	Jumlah	3	109

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2020

Data sentra industri yang ada di Kota Bukittinggi, pada umumnya bergerak pada industri pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronik serta kerajinan. Jenis industri pangan terbanyak adalah usaha kue basah, kerupuk dan sejenisnya. Dan usaha ini lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Sedangkan jumlah industri di bidang sandang lebih banyak mengelola pakaian jadi dari tekstil dan juga banyak menyerap tenaga kerja, Jenis industri lain yang banyak di Kota Bukittinggi yaitu kerajinan khususnya bordir dan sulaman yang tenaga kerjanya pada umumnya adalah perempuan.

Tabel 6.12. Data Umum Industri di Kota Bukittinggi.

No.	Jenis Industri	Komoditi	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	Makanan dan minuman	Industri mie sejenisnya	2	3
2		Industri roti / kue kering	30	115
3		Industri Kembang gula.	10	19
4		Industri Pengolahan kopi	74	169
5		Industri Kerupuk dan sejenisnya.	243	724
6		Industri Tahu	16	62
7		Industri es dan sejenisnya.	1	3
8		Industri Minuman ringan.	5	22
9		Industri Kue Basah.	380	832
10		Industri pelumat buah-buahan	15	47
11		Industri kacang balado	5	10
12	Sandang & Kulit	Industri Perajutan.	6	18
13		Industri pakaian jadi.	413	1.971
14		Industri barang dari kulit	25	65
15		Industri brg dr tekstil	81	365
16		Industri modeste.	14	30
17		Industri sepatu / sandal	124	530
18		Bordiran /Sulaman	319	1646
19	Logam & Elektronika	Industri Brg dr logam utk bangunan.	73	211
20		Industri brg dr logam alumunium.	21	45
21		Industri macam2 wadah dr logam.	13	17
22		Industri pupuk alam/ non sintetis makro primer	3	8
23		Jamu	4	9
24		Kosmetik	2	24
25		Gips	7	19
26	Kerajinan	Industri Kerajinan Bambu.	1	3
27		Kerajinan dari kayu	25	78
28		Furnitur dari Kayu	54	210
29		Percetakan	90	220
30		Batu Bata	75	392
31		Barang dari Kapur	5	15
32		Kerajinan Lainnya	82	207
33	Industri Barat/Sedang	Industri Makanan, minuman dan Tembakau	1	60
34		Barang Kimia Potrolen,Bata,Karet dan Barang dari plastic	2	49
Jumlah			2221	8198

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2019.

H. Koperasi

Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi terdiri dari beberapa jenis tergantung kepada tujuan koperasi atau latar belakang koperasi, misalnya koperasi Pegawai negeri Sipil, Koperasi Simpan Pinjam dan lain-lain.

Tabel 6.13. Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Kecamatan	Jml Koperasi			Anggota		
		Aktif	Tdk Aktif	Jumlah	L	P	L + P
1	MKS	11	4	15	866	866	1.683
2	ABTB	16	7	25	2.351	1.913	4.264
3	GP	41	12	53	4.362	4.742	9.104
Jumlah		70	23	93	7.530	7.521	15.951

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan untuk ikut sebagai anggota koperasi hampir berimbang dengan jumlah anggota laki-laki, hal ini berarti minat dari kaum perempuan cukup tinggi untuk peningkatan kesejahteraan kaum perempuan dan keluarganya serta masyarakat/organisasinya. Diharapkan peningkatan kesejahteraan ini mampu menciptakan perempuan yang maju dan lebih berdaya.

Kota Bukittinggi memiliki 93 koperasi pada 3 kecamatan, dan sudah bisa menyerap tenaga kerja/karyawan, seperti pada tabel berikut :

Tabel 6.14. Partisipasi Perempuan sebagai Pengurus Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Kec	Aktif	Tdk Aktif	Jml Kop	Manager			Karyawan		
					L	P	L+P	L	P	L+P
1	MKS	11	4	15	1	0	1	20	11	31
2	ABTB	18	7	25		1	1	22	43	65
3	GP	41	12	53				26	67	93
Jumlah		70	23	93	1	1	2	68	121	189

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Data di atas memperlihatkan bahwa baik manager maupun karyawan yang menjadi pengurus koperasi sudah diduduki oleh lebih banyak kaum perempuan, hal ini membuktikan bahwa perempuan sudah dapat dipercaya sebagai tenaga yang dianggap mampu mengelola koperasi dikarenakan oleh ketelitian atau keahliannya.

Jika dilihat dari jenisnya, koperasi di Kota Bukittinggi terdiri atas Koperasi serba usaha, koperasi kerajinan, simpan pinjam, koperasi Pegawai negeri, angkutan darat, POLRI, karyawan perum, Pensiunan PN, organisasi wanita, Koppas dan koperasi lainnya, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6.15. Jenis Koperasi berdasarkan kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019

Jenis Koperasi	Guguk Panjang	Mandiingin K. Selayan	Aur B T. Baleh	Jml
Koperasi Primer	54	16	23	93
1. Kop. Serba Usaha	9	2	1	12
2. Kop. Kerajinan	1			1
3. Kop. Simpan Pinjam	5	4	2	11

3.Kop.Menurut Golongan	34	8	16	58
- Pegawai Negeri	15	5	11	31
- Angkutan Darat	1			1
- Polri			1	1
- Karyawan/Perum	14	1	3	18
- Pensiun PN	1	1		2
- Organisasi Wanita	3	1	1	5
2. Koppas	2	1	1	4
3. Koperasi Lainnya	3	1	2	6
Jumlah	54	16	23	93

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tahun 2020

I. Kepala Keluarga Miskin

Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena akan berdampak langsung terhadap permasalahan ekonomi, sosial dan keamanan .

Tabel 6.16. Persentase Kepala Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2019.

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jml Keluarga Miskin	%
1	GP	8.031	201	2,5
2.	MKS	10.481	279	2,66
3.	ABTB	4.906	111	2,26
Jumlah		23.418	591	2,52

Sumber: Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Kota Bukittinggi Tahun 2020.

J. Pekerja pada Instansi Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah

Tabel 6.17. Tenaga Kerja di Lembaga/BUMN/BUMD/Instansi Vertikal

No	Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja		JUMLAH
		L	P	
1	Kantor Pos	23	14	37
2	Bank Nagari	68	52	120
3	BRI	101	79	180
4	BNI	41	72	113
5	BTN	12	6	18
6	Kemenag	61	51	112
7	BPS	7	17	24
8	PDAM		18	
9	Bulog		7	
10	Pengadilan Agama	20	14	34
Jumlah		333	305	638

Sumber: Instansi Vertikal/Lembaga Tahun 2018.

Tabel 6.18. Tenaga Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Perguruan Tinggi di Kota Bukittinggi.

No	NAMA PERGURUAN TINGGI	REKTOR/ DEKAN		DOSEN		KARYAWAN/ TENAGA PENDIDIK	
		L	P	L	P	L	P
1	UNP PGSD			15	29	6	6
2	AMIK BUKITTINGGI			6	10	5	6
3	UNIVERSITAS MHD. NATSIR	1		4	11	4	2
4	FAK. HUKUM MUHAMMADIYAH SUMBAR	1	1	23	10	7	5
5	POLTEKES PRODI KEBIDANAN	0	0	2	13	2	9
6	POLTEKES PRODI KESEHATAN GIGI	0	0	6	12	17	5
7	STIKES PRIMA NUSANTARA	3	6	3	8	8	4
8	STIKES YARSI	0	0	4	29	10	10
9	STIKES FORT DE KOCK	2	9	10	58	7	8
10	STIKES PERINTIS	3	9	5	15	14	19
11	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	0	0	5	21	1	5
12	AKBID PELITA ANDALAS	0	4	1	6	1	3
13	AKFAR DWI FARMA	0	0	4	7	11	11
14	AKFAR YAYASAN IMAM BONJOL (YIB)	1	3	2	4	1	4
15	UNIVERSITAS FOR DE KOCK						
JUMLAH		11	32	90	233	94	97

Tabel 6.19. Jumlah Tenaga Kesehatan (Medis) di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Jenis Profesi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dokter Spesialis	114	78	192
2	Dokter umum	36	97	133
3	Dokter gigi	2	28	30
4	Bidan	0	249	249
5	Perawat	150	791	941
6	Perawat gigi	7	38	45
7	Tenaga kefarmasian Teknis	9	151	160
8	Apoteker	15	61	76
9	Kesehatan Masyarakat	20	57	77
10	Kesehatan Lingkungan	7	13	20
11	Nutrisisionis	4	39	43
12	Dietision	0	5	5
13	Ahli Laboratorium Medik	7	50	57
14	Tenaga Teknik Biomedika lainnya	5	6	11
15	Keterapian Fisik	15	18	33
16	Keteknisian Medis	29	83	112
	JUMLAH	443	1819	2262

Sumber: Dinas kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2020

Tabel diatas menggambarkan bahwa profesi sebagai tenaga kesehatan didominasi oleh perempuan, kecuali pada tenaga dokter spesialis , di semua jenis profesi kesehatan perempuan lebih besar jumlahnya. Tingginya jumlah tenaga kesehatan yang perempuan disebabkan oleh tingginya peminatan perempuan pada pendidikan di jurusan kesehatan. Jenis profesi yang paling besar jumlahnya adalah perawat.

BAB VII

GENDER BIDANG POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Keterlibatan perempuan dalam politik, merupakan sebuah keharusan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara politis. Dikuatirkan rendahnya keterlibatan perempuan di partai politik dan parlemen, berdampak langsung pada kecilnya alokasi perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan perempuan, karena kebijakan-kebijakan dibuat tidak berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan perempuan, sehingga perempuan hanya diposisikan sebagai objek pembangunan dimana hak-hak dan kebutuhan kesejahtraannya terabaikan.

Akhirnya yang terjadi adalah, perempuan selalu berada pada posisi yang marjinal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya dilihat dari sistem pengupahan, upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki, jaminan kesehatan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, kebijakan-kebijakan moralitas lebih berpihak pada laki-laki dan sebagainya. Minimnya keterlibatan dan partisipasi politik perempuan ini, menjadi penyumbang terhadap termarjinalnya perempuan dalam pembangunan.

Oleh sebab itulah negara-negara penanda tangan konvensi CEDAW PBB di desak untuk melakukan tindakan nyata dalam mengatasi segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan. Di Indonesia salah satunya lahirlah gerakan *affirmative action* tindakan khusus yang dilakukan oleh negara untuk memberikan peluang, kesempatan dan dorongan kepada perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam politik. *Affirmative action* juga dapat difahami sebagai kompensasi negara terhadap perempuan yang selama ini termarjinalkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan gender tersebut. *Affirmative action* ini berlaku setelah pemerintahan reformasi di Indonesia.

Bentuk dari *affirmative action* itu diantaranya adalah, *pertama* mengaruskan pada semua partai politik dimana 30% pengurusnya adalah perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 UU No 12/2003. *Kedua* mengajukan prinsip keterwakilan perempuan dimana masing-masing partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Prinsip keterwakilan ini lebih dikenal dengan prinsip kuota 30% keterwakilan perempuan.

A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangun, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Di kota Bukittinggi, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, hanya saja apabila dibandingkan dengan laki-laki, keterlibatan perempuan jauh lebih rendah, hanya 2 orang (8%) perempuan yang duduk di legislatif dibandingkan laki-laki 23 orang (92%).

Tabel 7.1. Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2019.

NO	PARTAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	GERINDA	5		5
2	PKS	5		5
3	DEMOKRAT	4		4
4	GOLKAR	3		3
5	PAN	1	2	3
6	PPP	2		2
7	NASDEM	2		2
8	PKB	1		1
TOTAL		23	2	25

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kota Bukittinggi Tahun 2020

Angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD.

Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya rendahnya kemauan perempuan untuk terlibat dalam politik atau belum munculnya kesadaran perempuan dalam berpolitik. Padahal undang-undang sudah memberikan peluang yang sangat besar agar perempuan mempunyai keterlibatan dalam berpolitik.

Keberadaan perempuan di DPRD akan terlihat peranannya di komisi yang ada. Misalnya tugas Komisi A terkait dengan pemerintahan yang meliputi pemerintahan kelurahan dan nagari, ketertiban, keamanan, penerangan, pers, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, aparatur dan ketenaga kerjaan, perizinan, sosial politik, organisasi kemasyarakatan, pertanahan, kependudukan, agama dan sosial budaya.

Komisi B mempunyai tugas di bidang perekonomian, keuangan dan kesejahteraan, meliputi perdagangan dari dalam dan luar negeri, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah,

perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal, pengelolaan pasar, kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, ilmu dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita serta pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Komisi C bidang pembangunan meliputi pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata, lingkungan hidup, perumahan rakyat, pertambangan dan energi, perencanaan pembangunan.

Pada masing-masing tiga komisi tersebut mempunyai jumlah anggota yang berbeda-beda, termasuk juga perbedaan-perbedaan jumlah perempuan dalam masing-masing komisi tersebut. Bahkan khusus di Komisi C tidak ada anggota perempuan dalam komisi tersebut. Tentang jumlah sebaran anggota DPRD di masing-masing Komisi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2. Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Komisi dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	KOMISI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
1	I	7	1	8
2	II	7	0	7
3	III	6	1	7
4	Pada masing-masing komisi, pimpinan DPRD (Ketua dan wakil ketua sbg Koordinator	3	0	3
	TOTAL	23	2	25

Sumber: Setwan Kota Bukittinggi Tahun 2020.

B. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi pemerintahan, karena PNS sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah PNS yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas dan baik. PNS juga berperan sebagai pelayan daripada masyarakat, oleh sebab itu jumlahnya juga sangat menentukan terhadap kualitas layanan tersebut. Saat ini, di kota Bukittinggi terdapat sebanyak 2644 orang PNS yang akan melayani 128.783 penduduk kota Bukittinggi.

Dari 2644 jumlah PNS yang ada di Kota Bukittinggi, terdapat 1.635 perempuan atau 61,84% dan 1009 orang laki-laki atau 38,16 %. Dengan demikian PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan PNS laki-laki di Kota Bukittinggi.

Bila dilihat dari jenis pendidikan terdapat pendidikan terbanyak adalah sarjana S1 (65,77%). Jumlah PNS Kota Bukittinggi menurut pendidikan dan jenis kelamin ini dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019.

NO	PENDIDIKAN	LAK-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sampai dengan SD	67	2	69
2	SLTP/ Sederajat	31	3	34
3	SMA/Sederajat	279	156	435
4	Diploma.I,II/	11	44	55

	Akta I,II			
5	Diploma III,Akta III/Sarjana Muda	54	258	312
6	Tingkat Sarjana/Doktor	567	1172	1739
TOTAL		1009	1635	2644

Sumber: Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Selanjutnya, jika dilihat lebih rinci jumlah PNS menurut golongan dan jenis kelamin di Kota Bukittinggi maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya PNS perempuan bergolongan I dan II jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Disamping itu, di golongan III dan IV, PNS perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.4. Jumlah PNS menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	79	5	84
2	II	258	109	367
3	III	500	1131	1631
4	IV	172	390	562
Total		1009	1635	2644

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2020

2. Perempuan Menduduki Jabatan Eselon

Pada tahun 2019, PNS yang menduduki jabatan eselon di Kota Bukittinggi berjumlah 564 orang, 302 orang diantaranya adalah perempuan (53,54%). Dari jumlah tersebut hanya 3 orang (0,5%) yang menduduki esselon II sebagai pengambil kebijakan,

dimana laki-laki lebih dominan yaitu 20 orang, Perempuan lebih banyak menduduki jabatan struktural pada eselon IV yaitu 257 orang 58,4 % dari eselon IV seluruhnya, padahal jumlah perempuan menjadi PNS di Kota Bukittinggi lebih banyak dari pada laki-laki. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.5. Jumlah PNS menurut Esselon dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019.

NO.	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	II.	20	3	23
2	III	59	42	101
3	IV	183	257	440
Total		262	302	564

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2020

3. Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin

Pada tabel 7.6. di bawah terlihat bahwa PNS yang menduduki jabatan Fungsional lebih didominasi oleh perempuan yang tersebar sebagai tenaga pendidik/guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, PLKB dan lain-lain.

Tabel 7.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No.	Jenis PNS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS Fungsional Tertentu	172	785	957
2	PNS Fungsional Unum	575	548	1.123
3	PNS Struktural	262	302	564
Total		1009	1635	2644

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2020.

4. Camat

Di Kota Bukittinggi terdapat tiga kecamatan, yakni kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh. Masing-masing kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat. Untuk ketiga kecamatan tersebut camatnya laki-laki dan bahkan belum pernah ada perempuan.

Pada tingkat kecamatan, masyarakat belum pernah dipimpin oleh seorang camat perempuan. Jika dilihat pada masing-masing kecamatan itu perempuan selalu lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki.

Tabel 7.7. Jumlah Camat di Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	L	P	JML
1	GP	1	0	1
2	MKS	1	0	1
3	ABTB	1	0	1
	JUMLAH	3	0	3

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2020

5. Jumlah Lurah di Kota Bukittinggi

Di Kota Bukittinggi terdapat 24 kelurahan dari tiga kecamatan. Di kota Bukittinggi hanya ada lurah dan tidak ada nagari, namun sampai tahun 2019 hanya 3 lurah yang perempuan. Dari data diatas tergambar bahwa pada tingkat kepemimpinan terendah (Kelurahan) di Kota Bukittinggi masih di dominasi oleh laki-laki yaitu 88% atau 21 orang. Sebagaimana datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.8. Jumlah Lurah menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Guguk Panjang	6	1	7
2	Mandiingin Koto Selayan	8	1	9
3	Aur Birugo Tigo Baleh	7	1	8
	JUMLAH	21	3	24

Sumber : BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jabatan-jabatan strategis sampai pada kelurahan di Kota Bukittinggi didominasi oleh laki-laki.

Selain dari lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, juga terdapat PNS yang dari jalur vertikal, seperti dari Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, adapun PNS dari Kantor Kementerian Agama tersebut adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.9. Jumlah Pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019.

NO	INSTANSI	PNS			NON PNS		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	KANKEMENAG	110	227	337	-	-	0
2	MADRASAH	-	-	0	-	-	0
	- RA	-	1	1	-	17	17
	- MI	1	18	19	4	25	29
	- MTs	18	71	89	20	83	103
	- MA	21	72	93	35	92	127
3	PENYULUH AGAMA	8	6	14	14	24	38
4	DA'I	9	3	12	33	39	72
5	TPA	-	-	0	124	259	383
6	MDTA	10	4	14	95	305	400
	JUMLAH	177	402	579	325	844	1169

Sumber : Kantor Kemenag Kota Bukittinggi Tahun 2019

Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi secara keseluruhan, tenaga pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki, akan tetapi keberadaan perempuan adalah yang bekerja sebagai tenaga pengajar di madrasah atau di pendidikan. Sedangkan untuk tenaga da'i, penyuluh agama masih didominasi oleh laki-laki pada Pegawai Negeri Sipil.. Data ini menggambarkan pada pegawai non PNS sudah terlihat presentase yang lebih pada penyuluh agama, dai, TPA dan MDTA. Tenaga penyuluh agama serta da'i perempuan perlu ada, sehingga persoalan yang erat kaitannya dengan perempuan lebih dapat disampaikan secara lugas sesuai dengan kodratnya.

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di Lembaga Yudikatif dapat dilihat pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

1. Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Salah satu lembaga yudikatif adalah kejaksaan. Representasi perempuan dapat dilihat pada jumlah perempuan di Kejaksaan seperti pada tabel 7.10 berikut:

Tabel 7.10. Data Ketenagaan pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

No	Jabatan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR
1.	Kepala Kejaksaan Negeri	1		1		1	
2.	Kepala Sub Bag Pembinaan		1		1		1
3.	Kepala Seksi Inteligen	1		1		1	
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	1		1		1	
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	1		1		1	
6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara		1		1		1
7.	Kepala Urusan Kepegawaian		1		1		1
8.	Kepala Urusan Keuangan		1		1		1
9	Kepala Urusan Data Statistik dan Kriminologi	1		1		1	
		5	4	5	4	5	4

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2020.

2. Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 7.11. Data Hakim menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 dan Tahun 2019.

NO	JABATAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		L	P	L	P	L	P
1	KETUA	0	1	1	0	1	
2	WAKIL KETUA	0	0	1	0	1	

3	HAKIM	2	2	2	2	5	2
4	PANITERA	0	1	1	0	1	
5	SEKRETARIS	0	1	0	1		1
6	WAKIL PANITERA	1	0	1	0		
7	PANITERA MUDA	2	1	2	1	2	1
8	KEPALA SUB BAGIAN	2	1	2	1	1	2
9	PANITERA PENGGANTI	5	5	3	5	6	4
10	JURU SITA	1	1	1	1	2	3
11	JURU SITA PENGGANTI	1	2	1	2	1	2
12	STAF	1	2	1	1		
	JUMLAH	15	17	16	14	20	15

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2020

Tabel 7.11. di atas menunjukkan bahwa Hakim yang ada di Kota Bukittinggi jumlah laki-laki dan perempuan sama.

3. Polisi Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 7.12. Data Kepolisian menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019.

NO	JENIS KEPANGKATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
1	Perwira Tinggi			
	a. Jenderal Polisi	0	0	0
	b. Komisaris Jendral Polisi	0	0	0
	c. Inspektur Jenderal Polisi	0	0	0
	d. Brigadir Jenderal Polisi	0	0	0

2	Perwira Menengah (PAMEN)			
	a. Komisaris Besar Polisi	0	0	0
	b. Ajun Komisaris Besar Polisi	1	0	1
	c. Komisaris Polisi	6	0	6
3	Perwira Pertama (PAMA)			
	a. Ajun Komisaris Polisi	8	2	10
	b. Inspektur Satu Polisi	21	2	23
	c. Inspektur dua Polisi	42	2	44
4	Bintara	283	34	417
	JUMLAH	461	40	501

Sumber: Sumda Polresta Kota Bukittinggi.

Bila dilihat dari data di atas tergambar bahwa perempuan masih relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitifitas gender terhadap penegak hukum masih relative rendah. Oleh karena itu tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena kepengurusannya kurang diperhatikan secara optimal.

D. Pengurus Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik

1. Data Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik

Maraknya organisasi-organisasi perempuan, organisasi sosial, kemasyarakatan dan forum-forum yang beranggotakan perempuan merupakan salah satu indikator bahwa potensi

perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan haus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut, apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan lebih eksis dan lebih optimal.

Tabel 7.13. Data Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik Tahun 2019.

No	Nama Organisasi	Nama Pimpinan/Ketua	Alamat
1	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Bukittinggi.	Ny. Yesi Endriani Ramlan Nurmatias	Jl. Perwira Belakang Balok.
2	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bukittinggi.	Ny. Khadijah Irwandi	Jl. Perwira Belakang Balok.
3	Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bukittinggi.	Ny. Tuti Sofyan	Hotel Bunda, Jl. Guru Hamzah.
4	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Kota Bukittinggi.	Ny. Yesi Endriani Ramlan Nurmatias	Jl. Perwira Belakang Balok.
5	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Bukittinggi.	Ny. Arifah Inas	Jl. Perwira Belakang Balok.
6	Ikatan Kartini Profesional Indonesia (IKAPRI) Kota Bukittinggi.	Ny. Emmalinda Chaidir	Jl. Sudirman Birugo.
7	Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPEMI) Kota Bukittinggi.		
8	Forum Bundo Kota Bukittinggi.	Ny. Elfianis	Kel. Puhun Tembok.
9	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi.	Ny. Yesi Endriani Ramlan Nurmatias.	Jl. Perwira Belakang Balok.
10	Bundo Kanduang (BK) Kota Bukittinggi.	Ny. Efni, S.Pd	Jirek, Kel. Puhun Pintu Kabun.
11	Persatuan Wanita Kurai (PWK) Kota Bukittinggi.	Ny. Zulzetri, M.Pd	Pulai, Kel. Pulai Anak Air.
12	Pusat Kajian Wanita (PKW)	DR. Silvia Hanani	IAIN Kubang

	Kota Bukittinggi.		Putih.
13	Ikatan Isteri Pegawai Bank Daerah (ISBANDA) Kota Bukittinggi.	Ny. Mesti Epi Muluk	Bank Nagari Pasar Atas.
14	Ikatan Isteri Pegawai Bank Rakyat Indonesia (IWABRI) Kota Bukittinggi.	Ny. Mulyadi	BRI Pasar Atas.
15	Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IID) Kota Bukittinggi.	Ny. Eva Yunilawati	RSAM.
16	Dharma Yutikarini Kota Bukittinggi.	Ny. Helmyah Faiqoh Dadi Rachmadi	Luak Anyia, Kel. Kubu Gulai Bancah.
17	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bukittinggi	Ny. Paulina, S.ST	Tengah Jua, Kel. Aur Kuning.

2. Pengurus Harian Partai Politik

Di dalam kepengurusan harian partai politik, perempuan sudah mulai terlihat berperan, walaupun jumlahnya masih di bawah laki-laki.

Tabel 7.14. Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Parpol	No. SK/ Tanggal	Laki-laki	Perempuan	Jml
1	PPP	05/SK/DPW/C/XII/2016, 1 Desember 2016	27	14	41
2	Golkar	005/4/GKSD/VIII/2016 22 Agustus 2016	42	22	64
3	Gerindra	09-0143/Kpts/DPP GERINDRA/2012, 1 September 2012	36	19	55
4	Nasdem	589-SK/DPP-NASDEM/XI/2013	53	38	91
5	PDIP	24.05/KPTS/DPC/DPP/III/2015 7 Maret 2015	9	7	16
6	Demokrat	/SK/DPP.PD/DPC/VIII/2012	14	7	21
7	Hanura	SKEP/025/DPDSB/ HANURA/VIII/2016, 19 Agustus 2016	13	9	22
8	PKS	074/D/SKEP/AC00-PKS/1432, 2 Mei 2016	5	1	6
Jumlah			199	117	316

3. Kaukus Perempuan Politik

SK. KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) dengan Nomor SK. Walikota Bukittinggi Nomor 476/671/DP3APPKB/VII-18 tanggal Juli 2018, tentang Pembentukan Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bukittinggi Periode 2018-2022.

4. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertugas memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan dan pemindahan jabatan, kenaikan pangkat istimewa serta penunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta diklat jabatan. Oleh sebab itu eksistensinya sangat penting dalam suatu pemerintahan dan institusi.

Pemerintahan Kota Bukittinggi sampai Agustus 2018 hanya ada 6 (enam) orang Badan Pertimbangan Jabatan ini. Dari enam orang itu semuanya adalah laki-laki. Tidak satu pun perempuan. Pada hal, jika dilihat dari jumlah PNS yang ada di lingkungan pemerintahan kota Bukittinggi perempuan merupakan jumlah yang terbanyak dibandingkan dengan PNS laki-laki.

Tabel 7.15. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bukittinggi menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

No.	Badan Pertimbangan Jabatan & Kepangkatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Sekretaris Daerah	1	0	1
2	Asisten I	1	0	1
3	Asisten II	1	0	1
4	Asisten III	1	0	1
5	Kepala BKPSDM	0	1	1
6	Kepala Inspektorat	1	0	1
	Jumlah	5	1	6

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2020

BAB VIII
BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

A. Bidang Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan kepadanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Tabel 8.1 Jumlah Bekas Binaan Lembaga Pemasyarakatan menurut Kecamatan dan jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Guguk Panjang	2	0	2
2	Mandiingin Koto Selayan	1	0	1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3	0	3
		6	0	6

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi tahun 2020

Pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 6 orang Bekas Binaan Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2019, tidak ada bekas napi yang perempuan.

Sedangkan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2019 adalah sebagai berikut ;

Tabel 8.2 Jumlah Kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2019

Kasus	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pencurian	21		21
Asusila	7		7
Pembunuhan		1	1
Narkoba	27		27
Penganiayaan	2		2
Lainnya	12		12
Total	69	1	70

Sumber : Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2020

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pelaku kriminal yang ditangani kejaksaan adalah laki-laki, dan 1 orang yang perempuan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender diperlukan kebijakan yang bisa menjadi payung hukum agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1. Kebijakan/Program/Kegiatan yang Responsif Gender Kota Bukittinggi

Tabel 8.3. Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang Responsif Gender di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	SKPD	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	Dinas P3APPKB.	Perwako No. 22. Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Bukittinggi Tahun 2019.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan.	Fasilitasi penguatan kota layak anak melalui pembentukan kelurahan ramah anak.
				Fasilitasi Pengembangan & Perkuatan Forum Anak Daerah (FORDA) & Peringatan Hari Anak.
			Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak.	Perkuatan & Pengembangan P2TP2A.

				Pembinaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga.
			Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan.	Penguatan Ekonomi Perempuan Rentan Melalui KIE, Pelatihan, Pemberian Bantuan & Pameran.
				Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS).
			Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.	Fasilitasi & Perkuatan Organisasi Perempuan.
				Bimbingan & Pelatihan Politik oleh Kantor Kesbangpol.
				Bimbingan & Pelatihan Jabatan Publik.
				Fasilitasi Peringatan Hari Ibu.
				Penyelenggaraan, Pembinaan & Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
2	Dinas Kesehatan.		Upaya Kesehatan Masyarakat.	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan & Pengembangan.
				Jaminan Persalinan.
			Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat.	Fasilitasi Kota Sehat.
				Monitoring & Pembinaan Pokjanel Posyandu & DBD.
			Perbaikan Gizi Masyarakat.	Penanggulangan KEP, Anemia, GAKY, KVA & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.
				Monitoring & Evaluasi.
				KIE, Integrasi Program cGizi.
			Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak.	Peningkatan Kesehatan Ibu & Anak.
3	Dinas Sosial.		Pembinaan Anak Terlantar.	
			Perlindungan & Jaminan Sosial.	Fasilitasi & Penguatan Program Keluarga Harapan.
			Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	
4	Dinas Kesehatan.		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Lansia.

			Lansia.	
5	Dinas Pendidikan & Kebudayaan.		Program Wajib Belajar 9 tahun.	Penunjang Operasional SD/ SLTP.
			Pendidikan Luar Biasa.	Penyelenggaraan SDLB Manggis Ganting.
			Pendidikan Non Formal.	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD.
				Peningkatan Kompetensi Warga Belajar Paket C (Paket C Vokasional).
				Penyelenggaraan UPTD SKB Kota Bukittinggi.
				Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B & C.
				Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP.
				Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA.
				Pemberian Pendidikan Dasar Membaca Al-Qur'an.
6	BKPSDM.		Program peningkatan sumber daya aparatur	Pelaksanaan dilat pra jabatan CPNS
				Tugas belajar dan izin belajar PNSD
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penetapan jabatan fungsional, seleksi pengadaan dan pengawasan PNS
			Program Pendidikan kedinasan	Pelaksanaan dilat , pendidikan dan seleksi CPNS
			Program pelayanan adm kepegawaian	pengelolaan adm kenaikan pangkat, pengembangan SAPK, Peng.Pensiun
			Program peningkatan kesejahteraan aparatur	Pengurusan satya lencana, karya satya
				pembayaran tunjangan kesejahterann bagi tenaga non PNS
				Pembekalan persiapan purna tugas PNS
7	Badan Keuangan.		Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah.	Pengelolaan hibah , penyusunan rencana peraturan dan asistensi, pengelolaan
				keuangan daerah pengelolaan dan aset daerah

8	Dinas P3APPKB.		Keluarga Berencana.	Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling KB/KS.
				Kegiatan Pelayanan KB Serentak dan Komplikasi.
				Pembelian Penghargaan KB Teladan.
				Kegiatan Fasilitasi Koalisi Kependudukan.
				Kegiatan Penunjang Operasional PPKBK, Sub PPKBK dan Kader Poktan.
				Kegiatan Fasilitasi Lapangan Progam KKBPK.
				Kegiatan Fasilitasi/ Pelaksanaan Kampung KB.
				Kegiatan Penunjang Operasional Peserta KB, IUD, Implant dan Kader KB.
				Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Terpadu Program KKBPK.
				Kegiatan Pelatihan Motivator MOP bagi Peserta KB Pria.
				Operasional Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga.
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja.	Pusat Informasi Konseling Remaja.
				Pelatihan KRR bagi PS/KS.
				Fasilitasi Program Generasi Berencana.
				Kancah Bakti Saka Kencana.
			Program Pelayanan Kontrasepsi.	Penunjang Operasional Klinik KB.
				Fasilitasi Pembentukan & Pengembangan Poktan.
			Program pembinaan peran serta dan kesetaraan gender	Pembentukan dan pengembangan kelompok kegiatan
			Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pembentukan dan pengembangan kelompok kegiatan
9	Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan.		Program peningkatam kualitas kelembagaan koperasi	Pengawasan Koperasi
				Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat

			Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Penyuluhan pedagang aki lima
			Program Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM	Pengembangan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas UMKM
			Program perlindungan konsumen tertib niaga	Pengawasan , bantuan paket dan operasional dan penyediaan sarana UMKM
			Program peningkatan sarana dan prasaran pasar	rehab pemeliharaan peningkatan dan pemeliharaan sarana pasar
			Program UMKM di Kampung wisata	Pengembangan usaha mikro
				Pengembangan UMKM di kampung wisata
				Peningkatan kapasitas UMKM
			Program perlindungan konsumen	Pengawasan SIUP , TDP dan TDG
			Program peningkatan sarana pasar	Operasionalisasi pengelolaan WC Umum di Wilayah Pasar Bkt
10	Dinas Kominfo.		Kerjasama Komunikasi Informasi dan Media Massa.	Pembinaan warnet dan internet sehat
				Pembinaan media tradisional
			Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Pengelolaan dan peningkatan sarana prasarana Bkt Comencentre
11	Dinas Kebakaran.		Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran.	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
12	Dinas Duk Capil.		Penataan Administrasi Kependudukan.	Pelayanan Akta Kelahiran.
				Pengelolaan administrasi kependudukan dengan aplikasi SIAK
				Pelayanan identitas kependudukan
				Pelayanan pindah dan datang penduduk
				Pelayanan akta kematian
				Pengelolaan laporan informasi kependudukan
				Pelayanan akta perkawinan dan

				perceraian
				Peningkatan sistem pendataan bidang kependudukan
				pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
13	Sekretariat Daerah.		Program peningkatan urusan kesra dan keagamaan masyarakat	Pemberian bantuan tunjangan kesejahteraan guru MDTA,TKQ,GARIN dll
				pemberian penghargaan pemenang juara khatam alquran
				pengadaan baju da'l
14	Sekretariat DPRD		Program peningkatn urusan kesra	Pemberian bantuan operasional dan fasilitator urusan kesra
			Program pengelolaan stabilitas perekonomian,	Koordinasi tunjangan aoperasional dan pengawasan LKM
			Program pengembangan potensi ekonomi	kordinasi monitoring dan operasional tim forum pengembangan ekonomi daerah
15	Bapelitbang.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd.
16	Dinas Perhubungan.		Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas.	Pelatihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas
			Program pembangunan prasarana fasilitas perhubungan	Peningkatan pengelolaan terminal/parkir
				Pengelolaan Gedung parkir
				Pengadaan rubber, speed Humb
				Pengadaan dan pemasangan Guard Driyer
				Pengadaan Warning ligh
			Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Pembangunan Halte
				Pembangunan Zona selamat sekolah
17	Dinas Perpustakaan & Kearsipan.		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Gerakan Bukittinggi Membaca.
18	Dinas Satpol PP.		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk	Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Kota

			Menjaga Ketertiban dan Keamanan.	Bukittinggi di Lingkungan Pendidikan.
19	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga.		Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	Pemilihan Duta Wisata Kota Bukittinggi.
				Fasilitasi penampilan tim Kesenian
				Bukittinggi fasion on street and carnival
				Lomba foto grafi tingkat nasional
				Pelatihan pengelolaan home stay
				Pembinaan sadar wisata
				festifal multi etnis
				Peningkatan sadar wisata
			Program pengembangan destinasi pariwisata	Pengelolaan jam gadang
				Revitalisasi TMSBK
				Pemeliharaan dan pengadaan sarana rumah adat nan baanjuang
				Rehabilitasi kawasan destinasi wisata
			program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan	kecakapan hidup pemuda
				Fasilitasi peningkatan usaha wira usaha pemuda
			Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Kejurda cabang olah raga
				kegiatan pekan olah raga pelajar daerah tingkat prop. Dan nasional
				Fasilitasi kegiatan olah raga masyarakat
				Invitasi bola basket (walkota Cup)
				Fasilitasi lomba /pertandingan olah raga tradisional
				Kegiatan olah raga berkebutuhan khusus
				Bukittinggi Teknis wisata
				Fasilitasi kegiatan PORBI

				Fasilitasi Olah raga tradisional Anak Nagari
			Program pembinaan kepemudaan	Pelatihan dan pembinaan Paskibraka Tingkat Kota Bukittinggi & Prop
				Fasilitasi Kegiatan Marching band
				Fasilitasi seleksi kegiatan kepemudaan
				Lomba drum band Bukittinggi Open Marchingband
				Reward Atlit Pemuda dan Pelatih berprestasi
20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian & Tenaga Kerja.		Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja.	Pelatihan Kewirausahaan.
				Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
			Program peningkatan kualitas produktifitas tenaga kerja	Pelatihan kewirausahaan
				Pelayanan , pembinaan dan pengembangan produktifitas lembaga lahitan swasta
				Pelatihan pembuatan bedcover
				pelatihan instruktur lembaga latihan swasta
				pelatihan montir sepeda motor
				Pelatihan pembuatan dendeng singkong
				pelatihan modesti dasar untuk pemuda
			Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pembinaan fasilitasi dan pembangunan industri UMKM
			Program peningkatan kesempatan kerja	pelayanan dan penempatan tenaga kerja
			program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketanaga kerjaan	Penanganan kasus dan peningkatan kualitas SDM ketanaga kerjaan

			Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat	peningkatan kualitas pelayanan peneglolaan perizinan dan pengawasan tanpa usaha
			program peningkatan kemampuan tehnologi industri	Pelatihan rendo koto gadang
				perkuatan organisasi mitra UPTD kerajinan
				Perkuatan asosiasi makanan
21	Dinas PU & Penataan Ruang.		Pembangunan Jalan & Jembatan.	Peningkatan Trotoar.
22	BPBD.		Pencegahan Dini & Penanggulangan Bencana.	Operasional Pusat pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana.
23	Kantor Kesatuan Bangsa & Politik.		Pencegahan, Penanganan & Rehabilitasi Narkoba.	Operasional Komunitas Pemuda Anti Narkoba (Kompani) Kota Bukittinggi.
24	Dinas Lingkungan Hidup.		Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan.	Pembinaan Masyarakat Sekitar Aliran Batang Agam.
			Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
			Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Penunjang operasional pengelolaan sampah dan kebersihan
				Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPS
				Pendampingan pengelolaan sampah
				Pengadaan sarana dan prasarana persampahan
			Program pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup
			Program Pengelolaan RTH	Pemeliharaan pengelolaan pengadaan dan RTH
25	Dinas Perumahan Rakyat & Penataan Kawasan Pemukiman.		Program Lingkungan Sehat Perumahan.	Peningkatan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan.
26	Dinas Pendidikan & Kebudayaan.		Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.	Pembinaan dan Seleksi Guru Berprestasi Jenjang TK, SD & SLTP.
27	Badan Kepegawaian &		Program Peningkatan Kapasitas & Sumber	Kegiatan Pendidikan & Pelatihan

	Pengembangan SDM.		Daya Aparatur.	Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi Mengikuti Tugas Belajar & Izin Belajar.
28	Dinas Arsip		program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Bimtek, Lomba dan peningkatan sarana perpustakaan
29	Dinas Pertanian		Program Peningkatan kesejahteraan Petani	Pembinaan dan penilaian kelompok tani
			Program peningkatan ketahanan pangan	Koordinasi pemantauan dan peningkatan mutu pangan
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Bimtek Poktan
			Program peningkatan diservikasi pangan	Bimbingan dan pelatihan kelompok usaha
				Percepatan penganeka ragam konsumsi pangan
			Program pengembangan pengolahan dan pemasaran hsl perikanan	Promosi dan Sosialisasi gemari
30	Kec. MKS		Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan	Pembinaan fasilitasi TP PKK, kegiatan keagamaan, pembinaan adat istiadat
				dan penunjang operasional Kota Kumuah
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dl. Pemb. Desa	Musrenbang dan fasilitasi keagamaan
31	Kec. Guguk Panjang		Program peningkatan keberdayaan masyarakat	Pembinaan fasilitasi TP PKK, kegiatan keagamaan, pembinaan adat istiadat dan penunjang operasional Kota Kumuah
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Musrenbang dan fasilitasi keagamaan
			Program pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Merngutan kelompok keuangan mikro kelurahan
32	Kec. ABTB		Program peningkatan keberdayaan masyarakat	Pembinaan fasilitasi TP PKK, kegiatan keagamaan, pembinaan adat istiadat dan

				penunjang operasional Kota Kumuah
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Musrenbang dan fasilitasi keagamaan
			Program peningkatan kinerja LPMK dan RT	Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan
33	Inspektorat		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Reviu, pemantauan & evaluasi PPRG
			Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur	Pengawasan pelatihan , peningkatan kapasitas dan penangan kasus (APIP)
34	Bapelitbang		Program Perencanaan pengembangan wilayah startegis dan cepat tumbuh	koordinasi dan reviu sinkronisasi RPI2JM
			Program perencanaan pembangunan daerah	penyelenggaraan musrenbang, RKPD, penyusunan KUA PPAS
			Program perencanaan pembangunan ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
				Koordinasi pengembangan ekonomi kreatif
			Program perencanaan Sosial dan budaya	Koordinasi perencanaan pemb. Sosial Budaya
				Fasilitasi tim/koordinasi penanggulangan kemiskinan
				koordinasi pengarusutamaan gender Kota Bukittinggi
			Program penelitian dan penegmabangan menunjang pemerintah dan Pemb.	Koordinasi penguatan inovasi dan TTG kota Bkt

Tabel 8.4. Peraturan dan Kebijakan Daerah yang Responsif Gender 5 Tahun Terakhir.

No	Bentuk/ Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Judul Peraturan	Perangkat Daerah Pemrakarsa
1	Peraturan Daerah		RPJMD Tahun 2016-2021.	Bappeda
2	Peraturan Daerah	04 Tahun 2015	Perlindungan Perempuan dan Anak.	PPKB
3	Peraturan Daerah	1 Tahun 2012	Kawasan Tanpa Rokok.	Dinas Kesehatan
4	Peraturan Daerah	2 Tahun 2015	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.	Dinas Kebakaran
5	Peraturan Daerah	13 Tahun 2016	Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik baru Kota Bukittinggi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Peraturan Walikota	12 Tahun 2015	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Bukittinggi.	PPKB
7	Peraturan Walikota	43 Tahun 2014	Persyaratan tempat khusus merokok pada kawasan tanpa rokok.	Dinas Kesehatan
8	Peraturan Walikota	28 Tahun 2014	Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peraturan Walikota	41 Tahun 2014	Pedoman pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tk. pratama di lingkungan Pemko Bukittinggi.	Dinas Kesehatan
10	Keputusan Walikota	188.45-57-2018	Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kota Bukittinggi Tahun 2018.	DP3APPKB dan Bapelitbang
11	Keputusan Walikota	188.45-158-2018	Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
12	Surat Edaran Walikota	463/004/PPKB/I/V/2015 7 April 2015	Percepatan Pengarusutamaan Gender.	DP3APPKB
13	Keputusan Walikota	188-45-57-2018 Tahun: 2018	Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kota Bukittinggi Tahun 2018.	DP3APPKB
14	Keputusan Walikota	188.45-58-2018 Tahun: 2018	Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2018.	DP3APPKB
15	Keputusan Walikota	476/671/DP3APPKB/II-2018 Tahun: 2018	Pembentukan Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bukittinggi tahun 2018-2022.	
16	Keputusan Walikota	188.45-115-2018 Tahun: 2018	Pembentukan Focal Point/ Gugus Tugas Penanggung Jawab Pengarusutamaan Gender di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.	

17	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-349-2016 Tahun: 2016	Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kota Bukittinggi Masa Bakti 2016-2018.	DP3APPKB
18	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45.349-2016 Tahun: 2016	Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kota Bukittinggi Masa Bakti 2016-2018.	DP3APPKB
19	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-202-2015 Tahun: 2015	Perubahan Keputusan Walikota Nomor. 188- 45-202-2015 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Seayun Selangkah Kota Bukittinggi Periode 2015-2018.	DP3APPKB
20	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-015-2016 Tahun: 2016	Penetapan Kelurahan Benteng Pasar Atas Sebagai Kelurahan Layak Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
21	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-016-2016 Tahun: 2016	Penetapan Kelurahan Tarok Dipo Sebagai Kelurahan Layak Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
22	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-182-2015 Tahun: 2015	Penetapan Kelurahan Layak Anak di di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
23	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	27/Din.Kes/II-2015 Tahun: 2015	Kawasan Tanpa Rokok.	DP3APPKB
24	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	478-25/DP3APPKB//2016 Tahun :2016	Pemberian ASI Eksklusif.	DP3APPKB
25	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	Nomor :478-22/DP3APPKB//2017 Tahun :2017	Penyediaan Ruang Laktasi.	DP3APPKB
26	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-012-2017 Tahun: 2017	Penunjukan Puskesmas Rasimah Ahmad sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
27	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-017-2016 Tahun: 2016	Penunjukan Puskesmas Gulai Bancah sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
28	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-018-2016 Tahun: 2016	Penunjukan Puskesmas Mandiangin sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
29	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-36-2015 Tahun: 2015	Penunjukan Puskesmas Plus Mandiangin sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
30	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-37-2015 Tahun: 2015	Penunjukan Puskesmas Guguk Panjang sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
31	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-160-2016 Tahun: 2016	Penetapan Guguk Panjang Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
32	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-107-2016 Tahun: 2016	Penetapan Aur Birugo Tigo Baleh Sebagai Kecamatan Layak Anak	DP3APPKB

			(KELANA) di Kota Bukittinggi.	
33	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-142-2015 Tahun: 2015	Penetapan Mandiangin Koto Selayan Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB
34	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-92-2014 Tahun: 2014	Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Bukittinggi Tahun 2014-2017.	DP3APPKB
35	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-59-2017 Tahun: 2017	Penerapan Kelurahan Belakang Balok Sebagai Rute Aman Sekolah di Kota Bukittinggi.	Dinas Perhubungan
36	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-59-2017 Tahun: 2017	Penerapan Kelurahan Belakang Balok Sebagai Rute Aman Sekolah di Kota Bukittinggi.	
37	Keputusan Walikota	188.45-59-2017 Tahun: 2017	Penerapan Kelurahan Belakang Balok Sebagai Rute Aman Sekolah di Kota Bukittinggi.	

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017/ 2018.

Tabel 8.5. Peraturan dan Kebijakan Daerah yang terkait Perlindungan Perempuan dan Anak.

No	Bentuk/ Jenis Peraturan	Nomor Peraturan	Judul Peraturan	Perangkat Daerah Pemrakarsa	Ulasan/ Analisa
1	Peraturan Daerah Kota Bukittinggi	4 Tahun 2015	Perlindungan Perempuan dan Anak.	Kantor PPKB	
2	Peraturan Daerah	1 tahun 2015	Bangunan Gedung.	Dinas PUPR	<p>Pada Pasal 66 ayat 1: Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.</p> <p>Pasal 66 ayat 2: Penyedia tersedianya fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertical antar ruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi termasuk bagi</p>

					penyanggand cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
3.	Keputusan Ka Dinas Kebakaran.	188.45.14/ Diskar-02/2017	Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bahaya kebakaran dan Bencana bagi masyarakat.	Dinas Kebakaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan alat-alat pemadam kebakaran dan pencegahan bahaya kebakaran kpd anak PAUD serta Anak TK. - Memberikan pengetahuan kpd siswa SLTA thd pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran.
4	Keputusan Walikota	30 Tahun 2016	Pemanfaatan Teknolgi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.	Dinas Kominfo	
5	Keputusan Walikota Bukittinggi	188-45-202-2015 Tahun: 2015	Perubahan Keputusan Walikota Nomor. 188- 45- 202 – 2015 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Seayun Selangkah Kota Bukittinggi Periode 2015- 2018.	DP3APPKB	
6	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-015-2016 Tahun: 2016	Penetapan Kelurahan Benteng Pasar Atas Sebagai Kelurahan Layak Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
7	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-016-2016 Tahun: 2016	Penetapan Kelurahan Tarok Dipo Sebagai Kelurahan Layak Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
8	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-182-2015	Penetapan Kelurahan Layak Anak di di Kota	DP3APPKB	

		Tahun: 2015	Bukittinggi.		
9	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	27/Din.Kes/II-2015 Tahun: 2015	Kawasan Tanpa Rokok.	DP3APPKB	
10	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	478-25/ DP3APPKB/ I/2016 Tahun: 2016	Pemberian ASI Eksklusif.	DP3APPKB	
11	Surat Edaran Walikota Bukittinggi	478-22/ DP3APPKB/ I/2017 Tahun: 2017	Penyediaan Ruang Laktasi.	DP3APPKB	
12	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-012-2017 Tahun: 2017	Penunjukan Puskesmas Rasimah Ahmad sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
13	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-017-2016 Tahun: 2016	Penunjukan Puskesmas Gulai Bancah sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
14	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-018-2016 Tahun: 2016	Penunjukan Puskesmas Mandiangin sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
15	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-36-2015 Tahun: 2015	Penunjukan Puskesmas Plus Mandiangin sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
16	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-37-2015 Tahun: 2015	Penunjukan Puskesmas Guguk Panjang sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
17	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-160-2016 Tahun: 2016	Penetapan Guguk Panjang Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA)	DP3APPKB	

			di Kota Bukittinggi.		
18	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-107-2016 Tahun: 2016	Penetapan Aur Birugo Tigo Baleh Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
19	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-142-2015 Tahun: 2015	Penetapan Mandiangin Koto Selayan Sebagai Kecamatan Layak Anak (KELANA) di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
20	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-92-2014 Tahun: 2014	Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Bukittinggi Tahun 2014-2017.	DP3APPKB	
21	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-59-2017 Tahun: 2017	Penerapan Kelurahan Belakang Balok Sebagai Rute Aman Sekolah di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
22	Keputusan Walikota Bukittinggi	188.45-59-2017 Tahun: 2017	Penerapan Kelurahan Belakang Balok Sebagai Rute Aman Sekolah di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
23	Keputusan Walikota	188.45-59-2017 Tahun: 2017	Penerapan Kelurahan Belakang Balok Sebagai Rute Aman Sekolah di Kota Bukittinggi.	DP3APPKB	
24	Keputusan Lurah Belakang Balok	188.45/08/KP TS/BB/I-2016 Tahun: 2016	Penetapan Pengurus Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Belakang BALok Kec. ABTB periode 2016-2018.	DP3APPKB	
25	Keputusan Lurah Birugo	188.45/04/PM E-BRG/2016 Tahun: 2016	Penetapan Pembentukan Kepengurusan Kelompok Bina Remaja Birugo indah kelurahan	DP3APPKB	

			Birugo Kota Bukittinggi masa bakti 2016-2020.		
26	Keputusan Lurah LAdang Cangkiah	188.45.10/KP TS/LC/VI/2016 Tahun: 2016	Susunan Pengurus dan KAdler Bina Kelurga Remaja kelurahan LAdang CAngkiah Kec. ABTB masa bakti 2016-2020.	DP3APPKB	
27	Keputusan Lurah Campago Guguak Bulek	188.45/12/PM E-PPK/III/2016 Tahun: 2016	Pembentukan Kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Remaja Mekar Kelurahan Campago Guguak Bulek Kec. MKS masa bakti 2016-2020.	DP3APPKB	
28	Keputusan Lurah Kubu Tanjung	08/Kepts/KT/V /2016 Tahun: 2016	Susunan Pengurus dan KAdler Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Kubu Tanjung Kec. ABTB masa bakti 2016-2020.	DP3APPKB	
29	Peputusan Lurah Pakan Kurai	05/Kepts/PK/I/ 2016 Tahun: 2016	Susunan Pengurus dan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Pakan Kurai Kec. Guguak Panjang thn 2016-2020.	DP3APPKB	
30	Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun	440/01/BAP/I/ 2016 Tahun: 2016	Susunan Pengurus dan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Bukit Apit Puhun Kec. Guguak Panjang th 2016-2020.	DP3APPKB	
31	Keputusan Lurah Puhun Pintu Kabun	188.45/08/PM E-PPK/II-2016 Tahun: 2016	Penerapan Pembentukan Kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Remaja Kuriman Sejahtera Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kec.	DP3APPKB	

			MKS Kota Bukittinggi masa bhakti 2016-2020.		
32	Keputusan Lurah Parit Antang	188.45/05/KPTS/PA/I/2016 Tahun: 2016	Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kelurahan Parit Antang thn 2016-2020.	DP3APPKB	
33	Keputusan Kelurahan Belakang Balok	188.45/05/Kpts-BB/I-2016 Tahun: 2016	Pembentukan Kelompok Pelaksana Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Kelurahan Belakang Balok periode 2016-2018.	DP3APPKB	
34	Keputusan Lurah Campago Guguak Bulek	188.45/14/PME-PPK/III-2016 Tahun: 2016	Penetapan Pembentukan Kepengurusan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Seroja Kel. Campago Guguak Bulek Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi 2016-2020.	DP3APPKB	
35	Keputusan Lurah Pulai Anak Air	188.45/II/PME-PPK/II-2015 Tahun: 2015	Pembentukan Kepengurusan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Pulai Anak Air Kel. Pulai ANak Air Kec. MKS Kota Bukittinggi masa bakti 2015-2019.	DP3APPKB	
36	Keputusan	188.45/6/PME	Penetapan	DP3APPKB	

	Lurah Puhun Pintu Kabun	-PPK/II-2016 Tahun: 2016	Pembentukan Kepengurusan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kuriman Sejahtera Kel. Puhun Pintu Kabun Kec. MKS Kota Bukittinggi masa bakti 2016-2020.		
37	Keputusan Lurah Aur Kuning	188.45/B/PME -AK/III-2016 Tahun: 2016	Penetapan Pembentukan Kepengurusan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kel. Aur Kuning Kec. ABTB Kota Bukittinggi masa bakti 2016-2020.	DP3APPKB	

Tabel 8.6. Daftar Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat/LBH yang Peduli Perempuan dan Anak Tahun 2019.

Kec.	Nama Kelembagaan/ LSM/LBH	Nama Pimpinan/Ketua	Alamat Kantor
MKS	Parik Paga Campago Guguak Bulek.	Donny Syahputra, S.HI	Jl. Mr Asaat No. 43 Kel Campago Guguak Bulek.
	For De Kock Society in Sosial (Forsis).	Khairul Anwar, S.Ag, MH	Jl. H. Abdul Manan No. 3 Kel. Campago Guguak Bulek.
	Flora Training Center.	Nentien Destri, AMk. M.Pd	Jl. Abdul Manan Sarajo Kel. Guguak Bulek.
GP	LKS Kita Semua Sama (KISESA).	Antoni Firdaus	Jl. Tuanku Kubu RT. 001 RW. 001 Kel Kayu Kubu.
	Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia (PORPI).	Yusra Adek, S.Sos, MM	Jl. Ahmad Yani, No. 95 Kel. Benteng Pasar Atas.

Sumber: Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi Tahun 2019.

B. Bidang Sosial Budaya

1. Anak Terlantar

Tabel 8.7. Jumlah Anak Terlantar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Kecamatan	Tahun 2019		
		Laki-laki	perempuan	L+P
1	MKS	180	117	297
2	GP	130	103	233
3	ABTB	60	43	103
Jumlah		370	263	633

Sumber: LK2S Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Anak terlantar sesuai dengan Permensos No. 08 Tahun 2012, merupakan seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

2. Anak yang ditampung di panti Asuhan

Tabel 8.8. Jumlah Anak yang Ditampung di Panti Asuhan di Kota Bukittinggi Tahun 2017, 2018 dan 2019.

No	Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Bukittinggi	94	94	96

Sumber : Dinsos Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Anak yang ditampung oleh Panti Asuhan di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan sejumlah 2 (dua) orang dari tahun 2018, total di tahun 2019 sejumlah 96 orang

3. Bekas Warga Binaan lembaga pemasyarakatan

Tabel 8.9. Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017, 2018 dan 2019

No	Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Bukittinggi	15	-	2

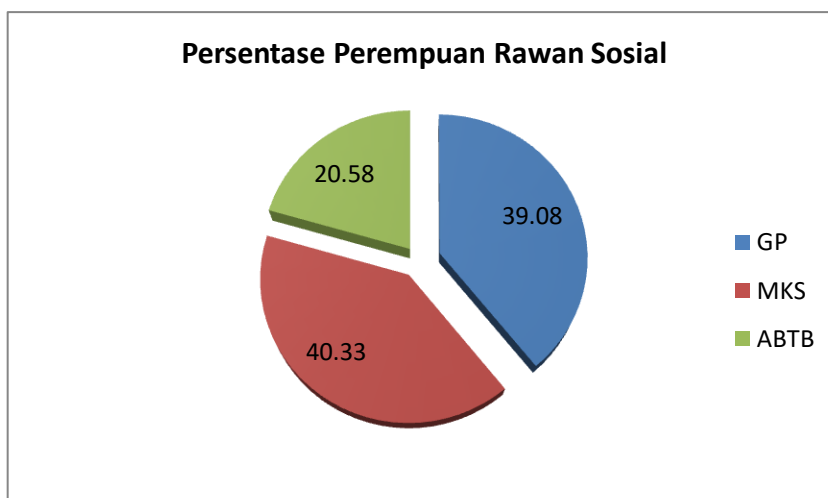
Sumber: Dinsos Kota Bukittinggi Tahun 2019.

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Permensos No 08 Tahun 2012, merupakan seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri, kemabli dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau menjalani kehidupan secara normal. Menurut tabel diatas , jumlah bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah sebanyak 2 orang.

4. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Perempuan rawan Sosial Ekonomi di Kota Bukittinggi Tahun 2019 menurut kecamatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 8.1 Persentase Perempuan Rawan Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2019



Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2019

Perempuan rawan sosial ekonomi dengan Permensos No. 08 Tahun 2012 merupakan seorang perempuan dewasa menikah/belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Berdasarkan tabel di atas, jumlah perempuan rawan social dan ekonomi terbanyak di kecamatan Mandiangin Koto selayan, 424 orang.

5. Penduduk Lansia Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Tabel 8.10. Jumlah Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Umur 60 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No.	Pendidikan Tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	Tidak Punya Ijazah	832	2.334	3.165
2	SD Sederajat	1.269	1.660	2.929
3	SLTP sederajat	966	805	1.771
4	SLTA sederajat	1.034	507	1.541
5	SMK sederajat	472	87	559
6	>SMA	295	415	710
	Jumlah	4.868	5.807	10.675

Sumber: Susenas BPS Kota Bukittinggi.

Berdasarkan table diatas Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk umur 60 tahun yaitu SD sederajat laki-laki sejumlah 1.269 orang perempuan 1.660 orang. Untuk pendidikan diatas SMK sederajat memiliki jumlah terendah yang ditamatkan oleh penduduk umur 60 tahun ke atas dengan jumlah laki-laki 472 orang dan perempuan sejumlah 87 orang.

6. Penyandang disabilitas

Disabilitas merupakan kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penderita disabilitas akan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak. Terdapat empat jenis disabilitas yaitu:

- Disabilitas fisik: Amputasi, lumpuh, paraplegi, stroke, disabilitas akibat kusta, cerebral palsy (CP).
- Disabilitas intelektual: Down syndrome, kretinisme, mikrosefali, makrosefali, dan skafosefali.
- Disabilitas mental: Skizofrenia, demensia, afektif bipolar, retardasi mental.
- Disabilitas sensori: disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Pengertian disabilitas ini memang cukup kompleks dan menggambarkan interaksi antara gerakan tubuh seseorang dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya.

Table 8.11 Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019

No.	Kecamatan	Penyandang Disabilitas
1	Guguk Panjang	91
2	Mandiingin Koto Selayan	80
3	Aur Birugo Tigo Baleh	24
Total	2019	195
	2018	123
	2017	385

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2020

Dari 195 penyandang disabilitas tahun 2019, terdapat anak disabel sebanyak 96 orang yang masih tergolong anak-anak.

7. Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2019

Tabel.8.12 Tabel Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2019

No.	Kecamatan	Pekerja Sosial	Karang Taruna	Tenaga Kerja Sosial	Organisasi Sosial
1	Guguk Panjang	37	6	1	9
2	Mandiingin Koto Selayan	51	8	1	6
3	Aur Birugo Tigo Baleh	35	7	1	2
Total	2019	123	21	3	17
	2018	125	24	3	16
	2017	125	24	3	18

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2019

BAB IX

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah berlangsung selama 14 tahun dan telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Undang-Undang tersebut memberi mandat kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perumusan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang kekerasan dalam rumah tangga; sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selain itu Peraturan presiden republic Indonesia nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan , bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas hukum upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan perlu diwujudkan secara nyata.

Mayoritas yang menjadi korban kekerasan didalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai istri, anak, maupun pembantu rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang.

A. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tabel. 9.1 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut umur di kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Kecamatan	Kelompok Umur			TOTAL
		0-<18	18->25	>25	
1	Guguk Panjang	3	0	4	7
2	Mandiingin K.Selayan	5	0	12	17
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3	0	2	5
	JUMLAH	11	0	18	29

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi korban kekerasan adalah pada usia dibawah 18 tahun dan diatas 18 tahun . Bila dilihat rentang usia korban ini , maka disimpulkan korban merupakan kategori anak-anak dan kategori orang dewasa. Kasus terbanyak berada di kecamatan Mandiingin Koto Selayan.

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih terjadi dalam berbagai bentuk dan modus yang tidak banyak mengalami perubahan dari tahun tahun sebelumnya. Akan tetapi belum didapatkan data yang akurat sesuai dengan yang terjadi di lapangan, karena stigma yang terjadi pada masyarakat adalah rasa malu apabila mengadukan permasalahan kepada orang lain, sehingga kasus kekerasan khususnya yang terjadi di rumah tangga tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang.

Bila dilihat dari tingkat pendidikan, terlihat pada table 9.2 dibawah, bahwa korban juga dialami oleh yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi.

Tabel. 9.2 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut tingkat pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2019 .

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat Sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT
1	Guguk Panjang	0	1	1	1	4	0
2	Mandiingin K.Selayan	1	2	0	4	7	3
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	3	0	0	2	0
	JUMLAH	1	6	1	5	13	3

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Terlihat pada table diatas bahwa perempuan korban kekerasan banyak terjadi pada tingkat pendidikan SLTA, yang berarti tindak kekerasan di Kota Bukittinggi tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh factor intelektual/ kebodohan, tentunya banyak factor lain yang mempengaruhinya, seperti factor emosional, ekonomi dan hal-hal lainnya.

Tabel 9.3. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Status Pekerjaan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Berusaha sendiri	Berusaha di bantu buruh tidak tetap	Buruh / Karyawan / Pegawai	Pekerjaan bebas di Pertanian	Pekerjaan bebas di Non Pertanian	Pekerjaan Keluarga	Pelajar/ lain-lain
1	Guguk Panjang	0	0	0	0	0	0	7
2	Mandiingin K.Selayan	0	0	2	0	0	0	15
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	1	0	0	0	4
	JUMLAH	0	0	3	0	0	0	26

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi pada pelajar, ini disebabkan karena :

- anak terutama pelajar cenderung tidak akan mengadakan kekerasan yang dialami karena khawatir akan menjadi pihak yang disalahkan.
- Anak sekolah mudah terpengaruh dengan bujuk rayu orang dewasa
- Tingkat ketakutan yang tinggi terhadap orang dewasa
- Penyalahgunaan gadget pada anak
- Mudah dibujuk rayu dengan pemberian uang atau hadiah
- Belum punya pengetahuan dan memahami tentang pendidikan seks
- Kurangnya pengawasan orang tua dan keluarga
- Kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga.

Tabel 9.4. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan di Kota Bukittinggi Tahun 2019

No	Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Mati	Cerai hidup
1	Guguk Panjang	4	2	0	1
2	Mandiangan K.Selayan	4	11	0	2
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3	1	1	0
	JUMLAH	11	14	1	3

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi korban kekerasan sebagian besar adalah perempuan yang belum kawin dan telah

kawin. Hal ini menggambarkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan banyak berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan jenis kekerasan dapat dilihat pada table dibawah ini .

Tabel 9.5. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	Guguk Panjang	1	4	2	0	0	0
2	Mandiangan K.Selayan	7	7	1	0	1	1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	3	0	0	1	1
	JUMLAH	8	14	3	0	2	2

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar kekerasan yang dialami perempuan adalah kekerasan Psikis, Kekerasan psikis merupakan bentuk lain dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jadi, KDRT tidak hanya kekerasan fisik penganiayaan dan semacamnya.

KDRT didefinisikan sebagai, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sini ada empat macam KDRT dan kekerasan psikis termasuk diantaranya.

Kekerasan psikis dapat berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT).

Tabel. 9.6 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Tempat kejadian di kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	Guguk Panjang	5	0	2
2	Mandiingin K.Selayan	15	1	1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3	0	2
	JUMLAH	23	1	5

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi di rumah tangga.

Tabel. 9.7 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis Pelayanan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Penanganan pengaduan	Pelayanan kesehatan	Rehabilitasi sosial	Penegakan & bantuan hukum	Pemulangan & reintegrasi
1	Guguk Panjang	7	0	0	0	0
2	Mandiingin K.Selayan	17	1	0	0	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	5	0	0	0	0
	JML	29	1	0	0	0

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari 29 orang yang datang ke P2TP2A , semua sudah dilaksanakan penanganan kasus.

Tabel. 9.8 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Frekuensi Kekerasan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rujukan
1	Guguk Panjang	7	0	0
2	Mandiingin K.Selayan	14	1	2
3	Aur Birugo Tigo Baleh	4	1	0
	JUMLAH	25	2	2

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Para korban perempuan yang melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, pada umumnya didominasi oleh rasa malu. Sehingga, mereka hanya melaporkan kejadiannya sekali dan dilanjutkan dengan konsultasi lanjutan. Pelaporan biasanya dilakukan setelah terjadi kekerasan fisik maupun psikis yang berulang. Saat perempuan itu sudah benar-benar tidak sanggup lagi menanggung kekerasan, mereka baru melaporkan kepada P2TP2A.

Tabel 9.9 Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Tingkat Pendidikan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					
		Tidak/ belum sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT
1	Guguk Panjang	0	0	2	1	4	0
2	Mandiingin K.Selayan	0	0	4	5	6	2
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	0	1	3	1
	JUMLAH	0	0	6	7	13	3

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan dilakukakan oleh orang yang juga berpendidikan, yang berarti bahwa pemicu terjadinya kekerasan adalah factor lain.

Tabel 9.10 Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Status Pekerjaan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Berusaha sendiri	Berusaha di bantu buruh tdk tetap	Pekerja bebas di Pertanian	Pekerja bebas di Non Pertanian	Pekerja Keluarga	Pelajar / lain-lain
1	Guguk Panjang	4	1	0	0	0	2
2	Mandiingin K.Selayan	6	3	0	1	0	7
3	Aur Birugo Tigo Baleh	2	0	0	0	0	3
	JML	12	4	0	1	0	12

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Pelaku kekerasan yang dilaporkan ke P2TP2A Kota Bukittinggi, memiliki pekerjaan berusaha sendiri, pelajar dan lain-lain.

Bila dilihat dari hubungan pelaku dan korban, maka kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dilakukan oleh suami korban

yaitu 16 orang, sedangkan selebihnya dilakukan oleh keluarga, orang tua dan keluarga lainnya. Sebagaimana terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 9. 11. Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Hubungan dengan korban di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Hubungan Dengan Korban			
		Suami	Orang Tua	Keluarga	Keluarga lainnya
1	Guguk Panjang	3	2	0	2
2	Mandiingin K.Selayan	12	2	1	2
3	Aur Birugo Tigo Baleh	1	2	1	1
	JUMLAH	16	6	2	5

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

B. Kekerasan Terhadap Anak

Tabel. 9. 12 JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT JENIS KEKERASAN DAN JENIS KELAMIN, PER KECAMATAN DI KOTA BUKITTINGGI													
NO	KEC	2019											
		JENIS KEKERASAN											
		FISIK		PSIKIS		SEKSUAL		EKSPLOITASI		PENELANTARAN		LAINNYA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Guguk Panjang	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	1	0
2	Mandiingin K.Selayan	0	0	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
	JUMLAH	0	0	2	3	4	3	0	0	1	2	2	2

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

Kekerasan pada anak biasanya terjadi secara Fisik, psikis dan sexual, penelantaran dan lainnya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi terhadap anak, adalah:

- 1) kekerasan fisik ; yang termasuk kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian ataupun tidak. Bentuk-bentuknya antara lain memukul,menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.
- 2) kekerasan psikologi/mental ; kekerasan ini meliputi perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, seperti berteriak-teriak, mengancam, merendahkan, menyumpah serapah, melecehkan, menguntit, dan memata-matai serta tindak-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut yang ditujukan kepada korban atau keluarga dekatnya.
- 3) kekerasan ekonomi; kekerasan ini adalah setiap perbuatan yang mengeksploitasi anak atau menelantarkan anggota keluarga, misalnya kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan sebagainya.
- 4) kekerasan seksual; kekerasan mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, bentuk-bentuk tersebut misalnya menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban melihat pornografi, ucapan yang merendahkan, melecehkan atau menyakiti korban. Untuk kekerasan seksual ini, si pelaku biasanya orang dekat yang nekat melakukannya.

Tabel. 9.13 Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan, Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	RPTC	LBH	PKT	PPT	UPPA	TRAUMACENTER	WOMANCRISISCENTER	SHELTER	RUMAHSINGGAH	RPSA	PANTI ASUAHAN ANAK	P2TP2A
1	Guguk Panjang	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
2	Mandiingin K.Selayan	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	9
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH		0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	19

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban kekerasan, melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah daerah. Di antara upaya yang dilakukan adalah pelayanan pelaporan/pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan korban secara pelayanan bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, pendampingan tokoh agama, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

Kota Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Sumatera Barat. Selain itu, Bukittinggi juga menjadi pusat perdagangan dan wisata. Ini jelas berdampak pada kompleksnya persoalan sosial kemasyarakatannya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencoba hadir dan memberi jalan keluar dalam persoalan pemberdayaan perempuan dan anak. Pada akhir tahun 2009 P2TP2A Saayun Salangkah didirikan di Kota Bukittinggi, yang operasionalnya dimulai pada tahun 2010.

Tabel. 9. 14 Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN									
		PENANGANAN PENGADUAN		PELAYANAN KESEHATAN		REHABILITASI SOSIAL		PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM		PEMULANGAN & REINTEGRASI	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Guguk Panjang	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
2	Mandiingin K.Selayan	5	4	5	4	0	0	0	0	0	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		9	10	9	10	0	0	0	0	0	0

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

Dampak kekerasan terhadap anak, apa pun tujuannya, sama sekali tidak bisa dianggap sepele. Kita bisa melihatnya dari penelitian UNICEF yang mengumpulkan dan menyusun berbagai dampak perlakuan kejam terhadap anak. Penyusunan itu kemudian digolongkan ke dalam empat area, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, keluaran kekerasan, dan dampak terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan.

BAB X

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada profil gender dan anak Kota Bukittinggi Tahun 2020, terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap penilaian keadilan dan kesetaraan gender antara lain:

1. Ketersediaan data

- a. Ketersediaan data sangat penting dalam menyusun suatu analisa yang tepat. Sehingga dapat digunakan oleh para pemangku dan pengambil kebijakan di Kota Bukittinggi untuk mengevaluasi kembali perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung maupun program pembangunan yang akan datang, apakah sudah responsive gender.
- b. Data terpilah perlu dijadikan isu strategis di seluruh sektor baik instansi pemerintah atau non pemerintah, lembaga masyarakat serta semua lini pembangunan mulai dari Tingkat Kota maupun tingkat kecamatan sampai kelurahan sehingga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam pembuatan format serta diskripsi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis gender dan anak.

2. Kependudukan

- a. Dari Proyeksi penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,45.

- b. Lebih dari seperempat penduduk perempuan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan kelangsungan generasi yang akan lahir, perhatian yang sangat dibutuhkan berupa kesehatan dan status gizi yang optimal serta perlunya dibekali dengan pengetahuan tentang pola asuh yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.
- c. Komposisi Penduduk perempuan yang produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif
- d. Pada tahun 2019 di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa 99,83 % penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP Elektronik, Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi dalam pengurusan KTP.
- e. 6090 kepala keluarga di Kota Bukittinggi adalah perempuan, hal ini berarti perempuan haruslah memiliki kemampuan baik secara ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya.

3. Pendidikan

- a. Perempuan memiliki Angka Partisipasi Sekolah hampir sama dengan laki-laki, yang berarti kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan telah menambah angka partisipasi wanita dalam pendidikan. Konsekuensinya terhadap perencanaan pembangunan yang harus dilakukan pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja bagi penduduk perempuan.
- b. Hampir seluruh penduduk Kota Bukittinggi sudah bisa baca tulis (99,7 %) , 0,3 % penduduk perempuan yang

masih buta huruf. Hal ini menunjukkan pencapaian pendidikan dasar yang efektif dan berhasilnya program keaksaraan.

4. Kesehatan

- a. Angka kematian Ibu pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2 kasus, penyebab kematian ibu tersebut adalah karena gangguan metabolik saat nifas dan Hipertensi dalam kehamilan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ANC.
- b. Angka Kematian Bayi pada tahun 2019 sebanyak 7 kasus, diperlukan perhatian yang optimal khususnya terhadap upaya peningkatan daya tahan tubuh bayi sebagai golongan yang rentan seperti pemberian ASI Eksklusif, Pemberian makan bayi dan Anak, Sanitasi, Pola Asuh, Immunisasi dan program terkait lainnya.
- c. Kasus baru HIV AIDS di Bukittinggi tidak saja terjadi pada laki-laki tetapi kasus juga ada pada perempuan, Tahun 2019 ditemukan 47 kasus laki-laki dan 15 orang perempuan. , diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk bisa menekan munculnya kasus baru.
- d. Partisipasi KB aktif masih di dominasi oleh perempuan, karena hanya 7,9 % laki-laki yang berpartisipasi aktif untuk ber-KB. Diperlukan terobosan yang mampu meningkatkan partisipasi KB pria.
- e. Usia perkawinan pertama sebagian besar warga Bukittinggi adalah pada usia 21 tahun lebih, terdapat 21,5% orang laki-laki yang menikah usia kurang dari 25 tahun dan 19,9% perempuan menikah usia kurang dari 21 tahun.

5. Ekonomi dan Ketenagakerjaan

- a. Keterlibatan perempuan pada kegiatan ekonomi (pasar kerja) lebih rendah dari pada laki-laki, ditandai dengan rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan dibandingkan laki-laki. Laki-laki 76,33% sedangkan perempuan 54,63 %.
- b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2019 sebesar 65,02 %.
- c. Lapangan pekerjaan yang terbanyak baik laki-laki maupun perempuan banyak pada lapangan pekerjaan perdagangan, eceran, rumah makan, hotel dan jasa.

6. Politik dan pengambil keputusan.

- a. Masih perlu dipersiapkan perempuan-perempuan yang berpotensi dan tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis (legislatif), untuk dapat dipersiapkan duduk bersaing dengan laki-laki menjadi caleg caleg yang dipercaya masyarakat
- b. Masih sedikitnya Pengambil keputusan di Kota Bukittinggi yang berjenis kelamin perempuan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan perempuan.

7. Hukum dan Sosial Budaya

- a. Kebijakan-kebijakan yang responsif gender di Kota Bukittinggi sudah mulai digerakkan, terbukti sudah terdapatnya beberapa SKPD yang sudah memprakarsai perencanaan yang berbasis gender.
- b. Permasalahan sosial masih memerlukan perhatian yang komprehensif dari semua pihak, karena pemecahan

permasalahan sosial disebabkan oleh berbagai macam sebab, seperti ekonomi, keluarga, masyarakat dan pemahaman agama.

8. Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan pada tahun 2019 belum dapat menggambarkan situasi yang sesungguhnya, karena budaya malu yang ada pada masyarakat kita masih menjadikan kasus kekerasan ini tidak semua yang dilaporkan. Disamping itu perlu upaya maksimal untuk memperkenalkan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi ke masyarakat agar masyarakat tahu kemana harus melaporkan kekerasan yang dialami baik dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

B. Saran

C.

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis pada buku Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan:

1. Perlu dilakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender dan anak untuk dapat mempersiapkan data dan informasi yang lebih lengkap, mudah dan efektif.
2. Perlu dilaksanakan pengkajian yang mendalam terhadap hasil analisa dan peranan masing-masing lembaga dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi keadilan dan kesetaraan gender di Kota Bukittinggi.

